

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
KOTA BATAM
TAHUN 2020





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.



LKjIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan setiap tahunnya dan sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Kota Batam kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumberdaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dapat memberikan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang efisiensi penyederhanaan pelaporan, Laporan Kinerja disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD yang memuat Perencanaan Kinerja dan capaian Akuntabilitas Kinerja merupakan informasi akuntabilitas kinerja disusun pada Bab II LPPD dengan



informasi data sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu, dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan;

memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur, Sumberdaya Keuangan, dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja;

memuat Visi, Misi, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja;

memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dan dukungan instansi lain atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2020. Semoga upaya mewujudkan masyarakat Kota Batam yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat pada tahun 2021 dapat lebih cepat tercapai.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Batam, Maret 2021

Walikota Batam

MUHAMMAD RUDI



PERNYATAAN TELAH DIREVIU



PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai. 3, Jalan Raja Isa Nomor 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com
B A T A M

Kode Pos 29464

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Batam, 22 Maret 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM



HENDRIANA GUSTINI, S.Sos.

NIP. 19660824 199008 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Kota Batam	2
C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4
D. Perangkat Daerah	6
E. Sumber Daya Aparatur	43
F. Isu Strategis	45

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Kota Batam Tahun 2016 - 2021	49
B. Misi Kota Batam Tahun 2016 – 2021	51
C. Tujuan Pembangunan Kota Batam	54
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	54
E. Indikator Kinerja Utama	59



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja	65
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	71
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	173

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	177
B. Saran	178

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam	
Tahun 2014 – 2020	47
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020.....	55
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam	60
Tabel 4 Nilai dan Predikat Kinerja.....	66
Tabel 5 Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Batam Tahun 2019	66
Tabel 6 Pencapaian Predikat dan Nilai Kinerja Pemerintah Kota Batam	
Tahun 2020.....	70
Tabel 7 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020	71
Tabel 8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD	73
Tabel 9 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020	74
Tabel 10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD	75
Tabel 11 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020	76
Tabel 12 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD	79
Tabel 13 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2020	80
Tabel 14 Jumlah Kasus Pelanggaran Tahun 2018 – 2020	81
Tabel 15 Daftar Pengamanan Aksi Demonstrasi	82
Tabel 16 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD	86
Tabel 17 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020	87
Tabel 18 Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2018 – 2020	89
Tabel 19 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD	90
Tabel 20 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2020	91
Tabel 21 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD.....	92
Tabel 22 Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2020.....	95
Tabel 23 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD	101



Tabel 24 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2020.....	102
Tabel 25 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2017 – 2020	104
Tabel 26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tahun 2018 – 2020	105
Tabel 27 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD.....	106
Tabel 28 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2020	107
Tabel 29 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD	108
Tabel 30 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2020	109
Tabel 31 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2020	112
Tabel 32 Rekapitulasi Dokumen Tata Ruang	114
Tabel 33 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD	115
Tabel 34 Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2020	116
Tabel 35 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD	117
Tabel 36 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2020	118
Tabel 37 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD	120
Tabel 38 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2020	121
Tabel 39 Jumlah Penumpang Yang Di Angkut Tahun 2017 – 2020	122
Tabel 40 Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 14 terhadap target RPJMD	123
Tabel 41 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD	128
Tabel 42 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2020	129
Tabel 43 Data capaian berdasarkan Basis Data Terpadu 2015	130
Tabel 44 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD	132
Tabel 45 Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2020	133
Tabel 46 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD	136
Tabel 47 Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2020	137
Tabel 48 Rata-rata lama tamu menginap di Kota Batam Tahun 2020	139
Tabel 49 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 terhadap target RPJMD	140



Tabel 50 Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2020	141
Tabel 51 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 terhadap target RPJMD	142
Tabel 52 Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2020	143
Tabel 53 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 terhadap target RPJMD	148
Tabel 54 Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2020	149
Tabel 55 Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2020	149
Tabel 56 Data Binaan Pelaku Usaha Mikro per Kecamatan Tahun 2017 – 2020	150
Tabel 57 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 terhadap target RPJMD	151
Tabel 58 Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2020	153
Tabel 59 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 terhadap target RPJMD	157
Tabel 60 Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2020	158
Tabel 61 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 22 terhadap target RPJMD	159
Tabel 62 Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2020	160
Tabel 63 Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d. akhir tahun 2020	162
Tabel 64 Rekapitulasi SR Sanitasi Kota Batam s.d. akhir tahun 2020	168
Tabel 65 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 23 terhadap target RPJMD	172
Tabel 66 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020	174



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2017-2020	78
Grafik 2 Jumlah Kasus Pelanggaran tahun 2018 - 2020	81
Grafik 3 Persentase Realisasi Kinerja tahun 2019 - 2020	82
Grafik 4 Pertumbuhan Penduduk di Kota Batam dibandingkan Kelengkapan Administrasi Kependudukan	89
Grafik 5 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Batam dari tahun 2016 – 2020	92
Grafik 6 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2017-2020	95
Grafik 7 Perbandingan IPG - IDG Kota Batam Tahun 2017 – 2020	104
Grafik 8 Perbandingan IPM Kota Batam Tahun 2020 dengan Provinsi	105
Grafik 9 Persentase penduduk miskin Kota Batam 2016 - 2020	108
Grafik 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2017 – 2020	111
Grafik 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2018 – 2020	117
Grafik 12 Jumlah penumpang yang di angkut Tahun 2017 – 2020	123
Grafik 13 Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum di Kota Batam dari tahun 2018 – 2020	124
Grafik 14 Peningkatan Panjang Jalan yang berfungsi Baik Tahun 2016 – 2020	125
Grafik 15 Perkembangan penanganan titik banjir Kota Batam tahun 2016 – 2020	127
Grafik 16 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran terhadap RPJMD	128
Grafik 17 Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam tahun 2016 – 2020	131



Grafik 18 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam

tahun 2016 – 2020 131

Grafik 19 Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam

tahun 2018 – 2020 136

Grafik 20 Rata-rata lamanya tamu menginap di Kota Batam pada tahun

2020 139

Grafik 21 Pertumbuhan nilai investasi Kota Batam dari tahun 2017-2020 142

Grafik 22 Nilai skor PPH Kota Batam tahun 2017 – 2020 147

Grafik 23 Data Binaan Pelaku Usaha Mikro Kota Batam tahun 2017 – 2020 ... 151



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Pemerintah Kota Batam dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan:

1. Rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016, yang kemudian karena adanya perubahan mendasar melalui kebijakan nasional yang mengakomodir Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kota Batam melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 yang sampai saat laporan ini disusun, dokumen tersebut masih berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam yang belum mendapatkan persetujuan dari DPRD.

2. Rencana pembangunan tahun 2020 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020; dan
3. Perjanjian Kinerja Walikota Batam tahun 2020.

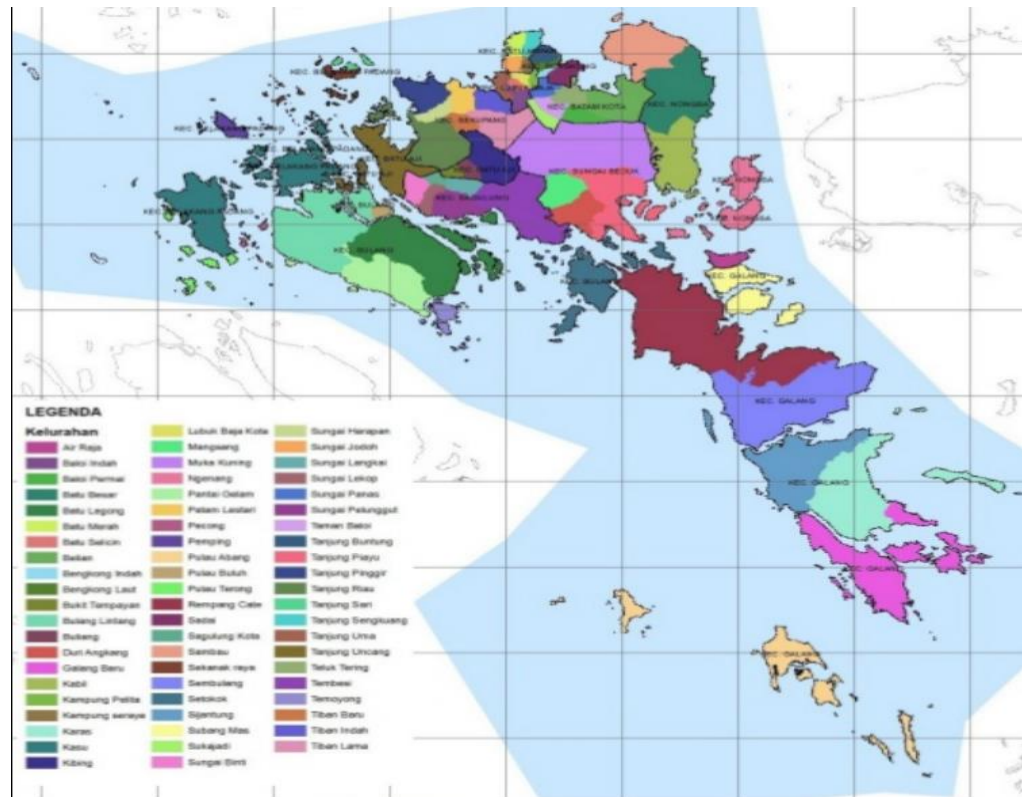
Selanjutnya buku ini akan menyajikan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. KONDISI KOTA BATAM

Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara : $0^{\circ} 25' 29''$ LU - $1^{\circ} 15' 00''$ LU dan $103^{\circ} 34' 35''$ BT $104^{\circ} 26' 04''$ BT dengan luas daratan mencapai $1.038,84 \text{ km}^2$ dan luas perairan sebesar $2.791,09 \text{ km}^2$.

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional dan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang



Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia / Pulau Singapore di bagian utara sampai dengan pulau pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan. Kota Tanjungpinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak disebelah timur dan memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Jarak Kota Batam ke Kota Tanjungpinang mencapai 44 mil. Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana sini berbukit bukit dengan ketinggian maksimum 160 meter diatas permukaan laut. Sungai sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan hutan serta semak belukar yang lebat. Jumlah pulau yang terdapatdi Kota Batam yaitu 371 pulau.

Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2020 berkisar antara 20,7°C – 23,9°C dan suhu maksimum berkisar antara

32,2°C – 34,9°C, sedangkan suhu rata rata sepanjang tahun 2020 adalah 26,8°C – 29,1°C. Keadaan tekanan udara rata rata untuk tahun 2020, berkisar antara 1.010,6 mb – 1.013,5 mb. Sementara kelembaban udara di Kota Batam rata rata berkisar antara 75% - 86%.

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh Kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;

- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olahraga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) perpustakaan; dan
- 17) kearsipan.

c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

D. PERANGKAT DAERAH



Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat Daerah di Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Komposisi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 sebanyak 44 Perangkat Daerah termasuk kecamatan yang meliputi 64 kelurahan, yaitu:



1. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 asisten dan 12 bagian yakni:
 - 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bagian Tata Pemerintahan
 - (a). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
 - (b). Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelola Perbatasan
 - (c). Sub Bagian Otonomi Daerah
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - (a). Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 - (b). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - (c). Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Bagian Hukum
 - (a). Sub Bagian Perundang-Undangan
 - (b). Sub Bagian Bantuan Hukum
 - (c). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - d. Bagian Kerja Sama
 - (a). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - (b). Sub Bagian Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri
 - (c). Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Bagian Perekonomian
 - (a). Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
 - (b). Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - (c). Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro

- b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - (a). Sub Bagian Penyusunan Program
 - (b). Sub Bagian Pengendalian Program
 - (c). Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
 - c. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
 - (a). Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - (b). Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - (c). Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Bagian Sumber Daya Alam
 - (a). Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - (b). Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - (c). Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air
- 3) Asisten Administrasi Umum
- a. Bagian Umum
 - (a). Sub Bagian Tata Usaha, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - (b). Sub Bagian Perlengkapan
 - (c). Sub Bagian Rumah Tangga
 - b. Bagian Organisasi
 - (a). Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
 - (b). Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - (c). Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - (a). Sub Bagian Protokol
 - (b). Sub Bagian Tata Usaha dan Komunikasi Pimpinan
 - (c). Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - (a). Sub Bagian Perencanaan
 - (b). Sub Bagian Keuangan
 - (c). Sub Bagian Pelaporan
- 2. Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - 1) Sekretariat
 - 2) Bagian Legislasi dan Persidangan
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Peraturan Daerah
 - b. Sub Bagian Persidangan
 - c. Sub Bagian Risalah
 - 3) Bagian Administrasi Keuangan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan
 - c. Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pertanggungjawaban
 - 4) Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Kearsipan
 - b. Sub Bagian Aset Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - c. Sub Bagian Pengamanan dan Lingkungan
 - 5) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - a. Sub Bagian Protokol
 - b. Sub Bagian Kehumasan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi

3. Inspektorat, terdiri dari:
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Inspektur Pembantu I
 - 3) Inspektur Pembantu II
 - 4) Inspektur Pembantu III
 - 5) Inspektur Pembantu IV
4. Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam, terdiri dari::
 - 1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - a. Bagian Umum;
 - (a). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - (b). Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat
 - b. Bagian Program dan Kerjasama; dan
 - (a). Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama
 - (b). Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - c. Bagian Keuangan
 - (a). Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
 - (b). Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
 - 2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - (a). Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus
 - (b). Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
 - b. Bidang Keperawatan; dan
 - (a). Seksi Asuhan Keperawatan
 - (b). Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan



- c. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
 - (a). Seksi Penunjang Medik
 - (b). Seksi Penunjang Non Medik.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Fasilitas Koordinasi ketertiban Umum
 - c. Seksi Pendataan Dan Penataan
 - 3) Bidang Penegakan Perundangan undangan Daerah
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
 - c. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan
 - 4) Bidang Sumber Daya Aparatur
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Seksi Teknis Fungsional
 - c. Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS
 - 5) Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - b. Seksi Potensi dan Sumber Daya Linmas
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas



6. Dinas Pendidikan;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
 - 3) Bidang Pembinaan Sekolah menengah Pertama
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
 - 4) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - 5) Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama



7. Dinas Kesehatan;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga
 - 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - 4) Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Peningkatan Mutu
 - 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a. Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

8. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Bina Marga
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan/Pelantar
 - b. Seksi Jalan
 - c. Seksi Jembatan Dan Pelantar
 - 3) Bidang Sumber Daya Air
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
 - b. Seksi Drainase Dan Sungai
 - c. Seksi Pantai Dan Waduk
 - 4) Bidang Peralatan dan Pengujian
 - a. Seksi Operasional Peralatan
 - b. Seksi Pemeliharaan Peralatan
 - c. Seksi Pengujian
 - 5) Bidang Penerangan Jalan Umum
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Penerangan Jalan Umum
 - b. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum
 - c. Seksi Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
9. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2) Bidang Prasarana Bangunan Gedung
 - a. Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- 3) Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah
 - a. Seksi Bina Teknik Air Bersih Dan Air Limbah;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.
- 4) Bidang Tata Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang
- 5) Bidang Bina Konstruksi
 - a. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Bina Kelembagaan Dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Bina Kompetensi Dan Produktifitas Jasa Konstruksi
10. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Seksi Rumah Susun;
 - b. Seksi Rumah Umum dan Komersial; dan
 - c. Seksi Rumah Khusus dan Swadaya

- 3) Bidang Permukiman
 - a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman; dan
 - c. Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
 - 4) Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman;
 - b. Seksi Pemeliharaan Taman; dan
 - c. Seksi pemakaman
11. Dinas Pertanahan;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Penatagunaan Dan Pendayagunaan Tanah
 - a. Seksi Penatagunaan Tanah;
 - b. Seksi Pendayagunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Penataan Kawasan Tertentu
 - 3) Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah
 - a. Seksi Pemanfaatan Tanah;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah; dan
 - c. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
 - 4) Bidang Pengawasan Pertanahan Dan Penanganan Masalah Pertanahan
 - a. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan;
 - b. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi Pertanahan



12. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin wilayah pesisir dan perbatasan; dan
 - c. Seksi Swadaya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang
- 4) Bidang Perlindungan, Jaminan Dan Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b. Seksi Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Dan Bantuan Sosial
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelurahan Dan ketahanan masyarakat;
 - b. Seksi Pengembangan Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat;
dan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan
Teknologi Tepat Guna

13. Dinas Tenaga Kerja;

- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA);
 - b. Seksi Penempatan Lembaga Penempatan Pembantu Rumah Tangga (LPPRT) dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Dalam Negeri
- 3) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
 - a. Seksi Pelatihan Kerja;
 - b. Seksi Instruktur dan Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
- 4) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial
 - a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Pembinaan Norma Hubungan Kerja; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 5) Bidang Pembinaan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Pengupahan; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja



14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Pemuda
 - a. Seksi Bina Kewirausahaan;
 - b. Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan; dan
 - c. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Keuangan
- 3) Bidang Olah Raga
 - a. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 - a. Seksi Pembinaan dan Pelatihan
- 4) Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - b. Seksi Sarana dan prasarana Olah Raga;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pramuka

15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;



- b. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum; dan
- c. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
- 3) Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - a. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan Dan Budaya;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Dibidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
- 4) Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan
 - a. Seksi Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - c. Seksi Data Informasi Perempuan Dan Anak
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - c. Seksi Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi
- 6) Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga
 - a. Seksi Bina Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Seksi Pendayagunaan Dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 - c. Seksi Data Dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga



16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

1) Sekretariat

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Bidang Ketahanan Pangan

- a. Seksi Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
- c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan.

3) Bidang Kelembagaan Dan Penyuluh

- a. Seksi Pengembangan Dan Kelembagaan Penyuluh;
- b. Seksi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani dan Peternak; dan
- c. Seksi Program Penyuluhan

4) Bidang Pertanian

- a. Seksi Sarana Dan Prasarana Pertanian;
- b. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
- c. Seksi Perlindungan Tanaman Dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Seksi Perbibitan Dan Produksi Ternak;
- b. Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- c. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan

17. Dinas Lingkungan Hidup;

1) Sekretariat

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2) Bidang Tata Lingkungan
 - a. Seksi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - b. Seksi Kajian Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; dan
 - c. Seksi Informasi Lingkungan Hidup
- 3) Bidang Pengelolaan Persampahan
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c. Seksi Retribusi
- 4) Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup
 - a. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
- 5) Bidang Pengawasan dan Penindakan
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penindakan dan Unit Reaksi Cepat
- 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Seksi Pendataan Penduduk

- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
 - 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi
 - 5) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Seksi Kerjasama;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan
19. Dinas Pemadam Kebakaran;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pencegahan
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 3) Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana
 - a. Seksi Operasi;
 - b. Seksi Penanggulangan Bencana dan Investigasi; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi

- 4) Bidang Sarana Prasarana dan Logistik
 - a. Seksi Prasana;
 - b. Seksi Sarana dan Logistik; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarpras
- 20. Dinas Perhubungan;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Lalu Lintas
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi keselamatan lalu lintas; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas.
 - 3) Bidang Angkutan Jalan
 - a. Seksi Angkutan Orang;
 - b. Seksi Angkutan Barang; dan
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 4) Bidang Prasarana Perhubungan
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - c. Seksi Prasarana Angkutan Laut
 - 5) Bidang Laut
 - a. Seksi Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 - c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

21. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Komunikasi dan Kehumasan
 - a. Seksi Pemberitaan;
 - b. Seksi Publikasi; dan
 - c. Seksi Dokumentasi
- 3) Bidang Penyelenggaran E-Government
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government
- 4) Bidang Statistik
 - a. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
 - b. Seksi Analisis Dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian
 - a. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
 - b. Seksi Layanan Informasi Publik;
 - c. Seksi Persandian

22. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- 2) Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan, dan Pemeriksaan
 - a. Seksi Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
 - b. Seksi Izin Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Kas; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
 - 3) Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam
 - a. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam; dan
 - c. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam.
 - 4) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Usaha Koperasi; dan
 - c. Seksi Perlindungan Koperasi
 - 5) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - c. Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan dan Data Usaha Mikro
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2) Bidang Promosi, Data dan Informasi
 - a. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Data Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Informasi Penanaman Modal
 - 3) Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan; dan
 - c. Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi Serta Mediasi
 - 4) Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial
 - a. Seksi Perizinan Ekonomi;
 - b. Seksi Perizinan Sosial; dan
 - c. Seksi Perizinan Penanaman Modal
 - 5) Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - a. Seksi Perizinan Pembangunan;
 - b. Seksi Perizinan Utilitas; dan
 - c. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup
24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Kebudayaan
 - a. Seksi Adat dan Tradisi;
 - b. Seksi Kesenian; dan
 - c. Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman



- 3) Bidang Sarana dan Obyek Wisata
 - a. Seksi Sarana Wisata;
 - b. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi
 - 4) Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata
 - a. Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata;
 - b. Seksi Promosi Wisata; dan
 - c. Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisata
 - 5) Bidang Ekonomi Kreatif
 - a. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan
 - c. Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pelestarian dan Kepustakaan
 - a. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - b. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan
 - c. Seksi Non Naskah
 - 3) Bidang Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan
 - a. Seksi Pengadaan Bahan Pustaka;
 - b. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka; dan
 - c. Seksi Pembinaan Perpustakaan

- 4) Bidang Kearsipan
 - a. Seksi Layanan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Penataan dan Pengelolaan; dan
 - c. Seksi Pelestarian
- 26. Dinas Perikanan;
 - 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Perikanan Tangkap
 - a. Seksi Sarana, Prasarana Dan Alat Penangkapan Ikan;
 - b. Seksi Kenelayanan Dan Diversifikasi Usaha Penangkapan; dan
 - c. Seksi Data, informasi Dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
 - 3) Bidang Perikanan Budidaya
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - b. Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya
 - 4) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan;
 - b. Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan; dan
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan
 - 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh
 - a. Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh; dan
 - c. Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh

27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

1) Sekretariat

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Bidang Perdagangan

- a. Seksi Ekspor dan Impor;
- b. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- c. Seksi Pengawasan Usaha dan Jasa Perdagangan

3) Bidang Pasar

- a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar Rakyat dan Tradisional;
- b. Seksi Bina Pasar dan Sektor Informal; dan
- c. Seksi Pengawasan Pasar

4) Bidang Tertib Niaga

- a. Seksi Pengawasan Kemetrollogian dan Perlindungan Konsumen;
- b. Seksi Informasi dan Penyuluhan Perdagangan; dan
- c. Seksi Penegakan Hukum

5) Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Seksi Sarana Industri;
- b. Seksi Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan
- c. Seksi Kerajinan Industri

28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

1) Sekretariat

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- 2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN
 - 3) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi
 - a. Sub Bidang Mutasi;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
 - 4) Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
 - a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian; dan
 - c. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
 - 5) Bidang Pengembangan Aparatur
 - a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Sertifikasi;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis, Fungsional dan Pendidikan Formal; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
29. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Sub Analisis Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Analisis Wilayah dan Konektivitas; dan
 - c. Sub Bidang Data, Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- 3) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
 - 4) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Pariwisata; dan
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 5) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman; dan
 - c. Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Statistik dan Persandian
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Penyediaan Anggaran Belanja Daerah

- 3) Bidang Perbendaharaan
 - a. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Belanja Pegawai
 - 4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja; dan
 - c. Sub Bidang Pelaporan
 - 5) Bidang Aset
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Aset Daerah.
31. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pendataan Penetapan dan Pelaporan
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
 - c. Sub Bidang Validasi dan Pelaporan
 - 3) Bidang Pembukuan
 - a. Sub Bidang Pembukuan Pajak dan Retribusi;
 - b. Sub Bidang Pembukuan PBB P2 dan BPHTB; dan
 - c. Sub Bidang Penyelesaian Piutang

- 4) Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - c. Sub Bidang Pertimbangan dan Keberatan
 - 5) Bidang Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi
 - a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Pajak dan Retribusi; dan
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Pajak dan Retribusi
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - 3) Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik
 - 4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - 5) Bidang Politik
 - a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu

33. Kecamatan Batam Kota terdiri dari:

- 1) Kelurahan Teluk Tering;
- 2) Kelurahan Taman Baloi;
- 3) Kelurahan Sukajadi;
- 4) Kelurahan Belian;
- 5) Kelurahan Sungai Panas;
- 6) Kelurahan Baloi Permai.

34. Kecamatan Nongsa terdiri dari:

- 1) Kelurahan Kabil;
- 2) Kelurahan Sambau;
- 3) Kelurahan Batu Besar;
- 4) Kelurahan Ngenang.

35. Kecamatan Sungai Beduk terdiri dari;

- 1) Kelurahan Tanjung Piayu;
- 2) Kelurahan Duriangkang;
- 3) Kelurahan Mangsang;
- 4) Kelurahan Muka Kuning.

36. Kecamatan Sagulung terdiri dari:

- 1) Kelurahan Tembesi;
- 2) Kelurahan Sungai Binti;
- 3) Kelurahan Sungai Lekop;
- 4) Kelurahan Sagulung Kota;
- 5) Kelurahan Sungai Langkai;
- 6) Kelurahan Sungai Pelunggut.

37. Kecamatan Batu Aji terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Bukit Tempayan;
 - 2) Kelurahan Buliang;
 - 3) Kelurahan Kibing;
 - 4) Kelurahan Tanjung Uncang
38. Kecamatan Sekupang terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Tanjung Riau;
 - 2) Kelurahan Tiban Indah;
 - 3) Kelurahan Patam Lestari;
 - 4) Kelurahan Tiban Baru;
 - 5) Kelurahan Tiban Lama;
 - 6) Kelurahan Sungai Harapan;
 - 7) Kelurahan Tanjung Pinggir.
39. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Tanjung Sengkuang;
 - 2) Kelurahan Sungai Jodoh;
 - 3) Kelurahan Batu Merah;
 - 4) Kelurahan Kampung Seraya
40. Kecamatan Bengkong terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Bengkong Laut;
 - 2) Kelurahan Bengkong Indah;
 - 3) Kelurahan Sadai;
 - 4) Kelurahan Tanjung Buntung
41. Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Kampung Pelita;
 - 2) Kelurahan Batu Selicin;
 - 3) Kelurahan Lubuk Baja Kota;



- 4) Kelurahan Tanjung Uma;
- 5) Kelurahan Baloi Indah
42. Kecamatan Belakang Padang terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Tanjung Sari;
 - 2) Kelurahan Sekanak Raya;
 - 3) Kelurahan Pemping;
 - 4) Kelurahan Pulau Terong;
 - 5) Kelurahan Pecong;
 - 6) Kelurahan Kasu.
43. Kecamatan Galang terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Sijantung;
 - 2) Kelurahan Karas;
 - 3) Kelurahan Sembulang;
 - 4) Kelurahan Subang Mas;
 - 5) Kelurahan Rempang Cate;
 - 6) Kelurahan Air Raja;
 - 7) Kelurahan Pulau Abang;
 - 8) Kelurahan Galang Baru;
44. Kecamatan Bulang terdiri dari :
 - 1) Kelurahan Pulau Buluh;
 - 2) Kelurahan Temoyong;
 - 3) Kelurahan Batu Legong;
 - 4) Kelurahan Pantai Gelam;
 - 5) Kelurahan Setokok;
 - 6) Kelurahan Bulang Lintang;



Adapun Luas Daratan menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (km²/sq.km), 2020 dapat dilihat berikut ini:

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
I. Belakang Padang		69.120
	1. Pulau Terong	5.791
	2. Pecong	1.382
	3. Kasu	50.637
	4. Pemping	4.249
	5. Tanjung Sari	2.041
	6. Sekanak Raya	5.020
II. Bulang		158.753
	1. Pantai Gelam	25.853
	2. Temoyong	5.351
	3. Pulau Setokok	24.886
	4. Batu Legong	49.775
	5. Bulang Lintang	50.697
	6. Pulau Buluh	2.187
III. Galang		350.764
	1. Pulau Abang	28.612
	2. Karas	50.449
	3. Sijantung	39.610
	4. Sembulang	65.834
	5. Rempang Cate	91.523
	6. Subang Mas	20.254
	7. Galang Baru	50.287
	8. Air Raja	4.191



IV. Sei Beduk		106.447
	1. Tanjung Piayu	28.595
	2. Duriangkang	11.273
	3. Mangsang	9.999
	4. Mukakuning	56.581
V. Nongsa		114.546
	1. Ngenang	19.546
	2. Kabil	25.915
	3. Batu Besar	41.009
	4. Sambau	28.074
VI .Sekupang		68.302
	1. Tanjung Riau	23.902
	2. Tiban Baru	3.886
	3. Tiban Lama	14.094
	4. Tiban Indah	5.936
	5. Patam Lestari	6159
	6. Sungai Harapan	3.325
	7. Tanjung Pinggir	10.999
VII.Lubuk Baja		11.426
	1. Batu Selicin	1.331
	2. Lubuk Baja Kota	1.459
	3. Kampung Pelita	1.393
	4. Baloi Indah	3.519
	5. Tanjung Uma	3.724



VIII. Batu Ampar		11.187
	1. Tanjung Sengkuang	3.787
	2. Sungai Jodoh	2.161
	3. Batu Merah	3.792
	4. Kampung Seraya	1.447
IX. Batam Kota		38.964
	1. Teluk Tering	5.890
	2. Taman Baloi	4.065
	3. Sukajadi	3.374
	4. Belian	17.683
	5. Sungai Panas	2.991
	6. Baloi Permai	4.960
X. Sagulung		54.780
	1. Tembesi	30.512
	2. Sungai Binti	5.356
	3. Sungai Lekop	3.723
	4. Sagulung Kota	1.933
	5. Sungai Langkai	3.983
	6. Sungai Pelunggut	9.271
XI. Batu Aji		41.337
	1. Bukit Tempayan	1.738
	2. Buliang	2.789
	3. Kibing	14.535
	4. Tanjung Uncang	22.274



XII. Bengkong		13.214
	1. Bengkong Laut	1.829
	2. Bengkong Indah	0,999
	3. Sadai	6.326
	4. Tanjung Buntung	4.060

Sumber : BPS Kota Batam

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 sebanyak 40 UPT, yaitu:

1. Cabang Dinas Pendidikan Belakang Padang
2. Cabang Dinas Pendidikan Bulang
3. Cabang Dinas Pendidikan Galang
4. UPTD Puskesmas Belakang Padang
5. UPTD Puskesmas Sungai Panas
6. UPTD Puskesmas Batu Aji
7. UPTD Puskesmas Kabil
8. UPTD Puskesmas Galang
9. UPTD Puskesmas Sekupang
10. UPTD Puskesmas Baloi Permai
11. UPTD Puskesmas Sungai Pancur
12. UPTD Puskesmas Tanjung Sengkuang
13. UPTD Puskesmas Sambau
14. UPTD Puskesmas Lubuk Baja
15. UPTD Puskesmas Sei Lekop
16. UPTD Puskesmas Bulang
17. UPTD Puskesmas Botania



18. UPTD Puskesmas Sei Langkai
19. UPTD Puskesmas Tiban Baru
20. UPTD Puskesmas Tanjung Buntung - Bengkong
21. UPTD Puskesmas Kampung Jabi
22. UPTD Puskesmas Rempang Cate
23. UPTD Puskesmas Tanjung Uncang
24. UPTD Puskesmas Instalasi Farmasi
25. UPTD Pengelola Air Bersih
26. UPTD Pengawasan Pengendalian Bangunan gedung dan menara
27. UPTD Pengelolaan Rumah Susun Sewa
28. UPTD Kebun Raya Batam
29. UPTD Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Nilam
Suri
30. UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas
31. UPTD Pusat Kesehatan Hewan
32. UPTD Pelayanan Bidang Perikanan
33. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
34. UPTD Tempat Pembuangan Akhir Telaga Punggur
35. UPTD Pelayanan Parkir
36. UPTD Pelayanan Jasa Transportasi
37. UPTD LPSE
38. UPTD Metrologi
39. UPTD Dana Bergulir
40. Kegiatan Sanggar Belajar

Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural Pemerintah Kota Batam Tahun 2020 terdapat sebanyak 1.168 jabatan struktural termasuk Staf Ahli, yang terdiri dari:

1. eselon II.a : 1
2. eselon II.b : 37
3. eselon IIIa : 63
4. eselon IIIb : 126
5. eselon IVa pada Perangkat Daerah dan UPTD : 625
6. eselon IVb pada Perangkat Daerah dan UPTD : 316

E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Batam yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2020 sebanyak 5.777 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	19	0	19	0,33
SLTP	23	4	27	0,47
SLTA	503	226	729	12,76
D.I	1	6	7	0,12
D.II	43	105	148	2,57
D.III	113	525	638	11,17
D.IV	53	61	114	2,00
S-1	1.397	2.250	3.647	63,84
S-2	207	173	380	6,65
S-3	4	0	4	0,07
Jumlah	2.363	3.350	5.713	100

2. Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
I	32	1	33	0,57
II	502	274	776	13,48
III	1.563	2.547	4.110	71,39
IV	297	541	838	14,56
Jumlah	2.394	3.363	5.757	100

3. Berdasarkan Eselon

Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
II.a	1	-	1	0,09
II.b	29	7	36	3,30
III.a	42	13	55	5,04
III.b	84	33	117	10,71
IV.a	359	239	598	54,76
IV.b	156	129	285	26,10
Jumlah	671	421	1.092	100

4. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Struktural	671	421	1.092	18,96
Fungsional	838	2.316	3.154	54,76
Staf	885	629	1.514	26,28
Jumlah	2.394	3.366	5.760	100

F. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin masih tinggi

Persentase penduduk miskin ini merupakan indikator makro Daerah yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yang dilihat dari sisi ekonomi dengan menggunakan indikator kesejahteraan. Persentase penduduk miskin di Kota Batam sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif. Dimana periode 2016 s.d 2018 terus mengalami kenaikan persentase penduduk miskin hingga angka 5,11 persen namun periode 2018 s.d 2020 mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,75 persen pada tahun 2020. Hal inilah yang menjadi permasalahan Kota Batam dalam hal kemiskinan, yaitu bukan pada tingginya angka kemiskinan karena angka kemiskinan Kota Batam merupakan paling rendah se-Provinsi Kepri, melainkan pada besarnya jumlah penduduk miskin. Hal ini terjadi disebabkan pertumbuhan penduduk juga disertai dengan pertumbuhan penduduk miskin, walaupun pertumbuhan penduduk miskin ini masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kota Batam lebih banyak dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk dibandingkan dengan faktor lainnya (kelahiran dan kematian). Dengan demikian, permasalahan kemiskinan makro Kota Batam

masih terkait dengan permasalahan kependudukan sehingga jika dilihat dari penurunan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 tidak memiliki pengaruh pada persentase penduduk miskin dikarenakan permasalahan penduduk tersebut diatas.

2. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan Kota Batam berfluktuasi setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.4. Namun demikian, secara tren pada periode 2018 terhadap 2019 menunjukkan adanya penurunan angka TPT dari 8,93 persen menjadi 8,31 persen. Pada tahun 2020 TPT Kota Batam mengalami peningkatan hingga 11,79 persen dimana hal ini merupakan imbas pandemi Covid 19 dimana terjadinya peningkatan karyawan yang dirumahkan dengan mayoritas perusahaan yang bergerak di bidang jasa, restoran, perhotelan, tour and travel serta bidang pariwisata lainnya.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini sebenarnya mengikuti konsep dasar yang dilakukan UNDP (United Nation Development Programme), dan mulai tahun 2014, BPS melakukan perhitungan IPM dengan metode baru, dengan metode baru ini indikator Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena kurang dapat menggambarkan

kualitas pendidikan. Selain itu AMH di sebagian besar daerah sudah cukup tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Sebagai pengganti indikator ini adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). Indikator AHLS akan berkombinasi dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam menyusun Indeks Pengetahuan. Perpaduan ini dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan lebih bisa menunjukkan perubahan yang terjadi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam
Tahun 2014 – 2020

Komponen IPM		Umur Panjang dan Hidup Sehat (UHH)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Riil per Kapita Disesuaikan (ribu Rp)	IPM	Peringkat Nasional untuk Kota Batam
Tahun	2014	72,8	12,62	10,8	16.735,99	79,14	16
	2015	73	12,65	10,81	16.825,62	79,34	15
	2016	73,09	12,67	11,1	16.889,00	79,79	22
	2017	73,19	12,94	11,11	17.131,00	80,26	22
	2018	73,24	12,95	11,12	17.560,00	80,54	24
	2019	73,29	13,15	11,13	18.146,00	81,09	15
	2020	n/a	13,16	11,14	18.095,00	81,11	23
Nilai Maks		85	18	15	26.572,35	0	
Nilai Min		20	0	0	1.007,44	0	
Keterangan		Standar UNDP					

Sumber : BPS Kota Batam (2010-2020)



Dari tahun ke tahun, IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Seiring dengan semakin meningkatnya indikator-indikator penyusunnya, angka IPM Kota Batam juga semakin tinggi. Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional pun, Kota Batam masih dapat dikatakan menempati posisi diatas 25 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik periode 2011-2019. Terakhir tahun 2019, Kota Batam berada di peringkat ke-15 dari 515 kabupaten/kota se- Indonesia, dengan nilai IPM sebesar 81,09. Di tahun 2020 namun peringkat Kota Batam tahun 2020 turun menjadi peringkat 23 dengan angka IPM Kota Batam sebesar 81,11 sebagaimana tercantum dalam tabel.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. VISI KOTA BATAM TAHUN 2016-2021

Visi Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat". Visi tersebut di atas memberikan pemahaman dan makna sebagai berikut :

- ✚ Batam meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.
- ✚ Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional AsiaTenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellences*", dengan melakukan pendalaman pada

fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

- ✚ Madani mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.
- ✚ Berdaya Saing dalam makna mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.
- ✚ Maju adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
- ✚ Sejahtera bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang

lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

- ✚ Bermartabat mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

B. MISI KOTA BATAM TAHUN 2016-2021

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Kota Batam, yaitu:

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

2. Mewujudkan SDM Daerah yang Bertaqwa, Berdaya saing dan Masyarakat yang Sejahtera.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.

3. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan dengan Infrastruktur Perkotaan yang Modern serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri, dan Nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

4. Mewujudkan penguatan sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut

dapat memberikan *value added* terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Umkm dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri Dan Pasar Domestik.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal *sustainability businesses*. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah *hinterland*, sehingga masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah *hinterland* menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah *hinterland*.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA BATAM

Dalam penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kota Batam maka ditetapkan Tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan;
2. Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat;
3. Mewujudkan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan ketenagakerjaan yang unggul, merata, terjangkau, berdaya saing dan bertaqwa menuju masyarakat sejahtera.
4. Mewujudkan penataan ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas dan pemukiman layak huni dan terjangkau;
6. Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, investasi, dan perikanan dan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tangguh & mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta sektor informal lainnya.
8. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses komunikasi di hinterland.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada dokumen IKU Kota Batam Tahun 2018-2021, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan berkualitas	Opini BPK	WTP
		Evaluasi SAKIP	66
2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	3,5 - < 4,2
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	90%
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	50%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	60%



5	Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan	Persentase kelengkapan administrasi kependudukan	94,5%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	Angka Harapan Lama Sekolah	13,40
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,6
7	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Angka Usia Harapan Hidup	72,80 Tahun
8	Meningkatkan kualitas peran gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,53
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59
9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	4,6%
10	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	6,1%



11	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tata kota dengan RTRW	95%
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	66%
13	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	100%
14	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman	Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum	17,02%
		Persentase jalan dalam kondisi baik	78%
		Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir	15 titik



15	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	85,77
16	Meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan perdagangan	Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian	42,94%
17	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	Length of Stay (Lama Kunjungan)	2,09
18	Peningkatan Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Investasi	18,17%
19	Meningkatkan sektor pertanian/perikanan	Meningkatnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	94,05%
20	Meningkatnya peran industri kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro	14

21	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland	Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland	78,02
		Persentase pemenuhan jembatan/pelantar di Wilayah Hinterland	82,73
		Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland	6,7
22	Meningkatnya konektivitas Transportasi di hinterland	Cakupan pelayanan Transportasi Laut di daerah hinterland	100
23	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta	37,29
		Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland	8,4

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sesuai lampiran surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor: 312/Bapelitbangda/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah sesuai dengan Ranperda Perubahan

RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan berkualitas	Opini BPK
		Evaluasi SAKIP
2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase Penurunan Pelanggaran K3
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda



5	Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan	Persentase kelengkapan administrasi kependudukan
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	Angka Harapan Lama Sekolah
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah
7	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Angka Usia Harapan Hidup
8	Meningkatkan kualitas peran gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan
10	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
11	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tata kota dengan RTRW



12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam
13	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan
14	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman	Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum
		Persentase jalan dalam kondisi baik
		Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Persentase Rumah Layak Huni
16	Meningkatkan kinerja sektor lerindustrian dan perdagangan	Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian



17	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	Length of Stay (Lama Kunjungan)
18	Peningkatan Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Investasi
19	Meningkatkan sektor pertanian/perikanan	Meningkatnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan)
20	Meningkatnya peran industri kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro
21	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland	Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland
		Persentase pemenuhan jembatan/pelantar di Wilayah Hinterland
		Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland



22	Meningkatnya konektivitas Transportasi di hinterland	Cakupan pelayanan Transportasi Laut di daerah hinterland
23	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta
		Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Bab ini akan menjabarkan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung setiap sasaran, realisasi anggaran masing-masing sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 4
Nilai dan Predikat Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	≥ 90	Sangat Berhasil
2.	70 s/d <90	Berhasil
3.	50 s/d <70	Cukup Berhasil
4.	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Batam Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 – 49,99 Kurang Berhasil	50,00 – 69,99 Cukup Berhasil	70,00 – 89,99 Berhasil	≥ 90 Sangat Berhasil
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan berkualitas	2	100	-	-	-	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	1	88,86	-	-	Berhasil	-



3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	2	- 4,81	Kurang Berhasil	-	-	-
5	Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan	1	98,53	-	-	-	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	2	97,12	-	-	-	Sangat Berhasil
7	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	1	100,73	-	-	-	Sangat Berhasil



8	Meningkatkan kualitas peran gender	2	99,43	-	-	-	Sangat Berhasil
9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	1	96,84	-	-	-	Sangat Berhasil
10	Mengurangi angka pengangguran	1	51,74	-	Cukup Berhasil	-	-
11	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	1	104,98	-	-	-	Sangat Berhasil
13	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
14	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman	3	69,48	-	Cukup Berhasil	-	-



15	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	1	104,54	-	-	-	Sangat Berhasil
16	Meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan perdagangan	1	80,51	-	-	Berhasil	-
17	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
18	Peningkatan Investasi Kota Batam	1	582,83	-	-	-	Sangat Berhasil
19	Meningkatkan sektor pertanian/ perikanan	1	98,03	-	-	-	Sangat Berhasil
20	Meningkatnya peran industri kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	1	335,71	-	-	-	Sangat Berhasil

21	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland	3	62,98	-	Cukup Berhasil	-	-
22	Meningkatnya konektivitas Transportasi di hinterland	1	100	-	-	-	Sangat Berhasil
23	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	2	115	-	-	-	Sangat Berhasil

Pencapaian kinerja 12 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 6

Pencapaian Predikat dan Nilai Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020

No.	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Berhasil	17	73,91
2.	Berhasil	2	8,70
3.	Cukup Berhasil	3	13,04
4.	Kurang Berhasil	1	4,35
	Jumlah	23	100%

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran “TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH YANG EFEKTIF DAN BERKUALITAS”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Berkualitas” di realisasikan dengan 2 (dua) indikator kinerja, telah diukur dengan predikat “**Sangat Berhasil**” dan hasil diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 7
Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%) Capaian
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
2.	Evaluasi SAKIP	Nilai	66	n/a	n/a
Rata-rata capaian					100

Sumber data : Bagian Organisasi Setdako Batam dan BPKAD Kota Batam

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2020 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, sesuai surat Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 83.B/LHP/XVIII.TJP/05/2020 dan Nomor: 83.C/LHP/XVIII.TJP/05/2020 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020. Dengan demikian capaian indikator kinerja “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” tercapai 100%. Opini WTP telah diperoleh Pemerintah Kota Batam sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut sejak tahun 2012.

Salah satu pencapaian akuntabilitas Pemerintah Kota Batam lainnya adalah keberhasilan WaliKota Batam memperoleh penghargaan Pemimpin Pembawa Perubahan untuk Indonesia dalam Kategori Best Mayor 2020.



WALIKOTA BATAM KATEGORI BEST MAYOR 2020

Piagam Penghargaan Pemimpin Pembawa Perubahan untuk Indonesia

b. Predikat SAKIP Kota Batam

Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2020 belum dapat disampaikan, hal ini dikarenakan hasil penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 yang dilakukan oleh

Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia belum dirilis.

Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	n/a	A

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Batam dan BPKAD Kota Batam

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang undangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 4.303.897.934,50 dari anggaran sebesar Rp 8.876.754.162,00 atau 48,49%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 88,86% dan termasuk predikat “**berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks SPBE	3,5 - < 4,2	3,11	88,86

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik secara online dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kota Batam yang telah dilakukan mulai tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam usaha pelaksanaan SPBE tersebut diatur dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sampai saat ini telah ada 52 aplikasi informatika dengan 156 jumlah layanan publik Pemerintah Kota Batam yang dilayani Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 61 layanan informasi dari website OPD, 13 layanan online di aplikasi APOK, 57 perizinan, dan 25 layanan terkait penerapan E-Office, E-Government, SIPKD dan SIMPEG.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, pencapaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan pada bidang penyelenggaraan E-Government. Namun pencapaian ini masih harus ditingkat lagi apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, hal ini dikarenakan pencapaian sebesar 3,11 masih belum berada dalam rentang penilaian. Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Indeks SPBE	Nilai	1,8-< 2,6	2,6 - < 3,5	3,11	3,5 - <4,2

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
2. Program peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

3. Program penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah
4. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 12.494.653.357,00 dari anggaran sebesar Rp 13.045.775.470,00 atau 95,77%. Realisasi keuangan sebesar 95,77% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,86%, maka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut belum berhasil secara maksimal.

3. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11

Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Perencanaan	90	90	100

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian,

Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

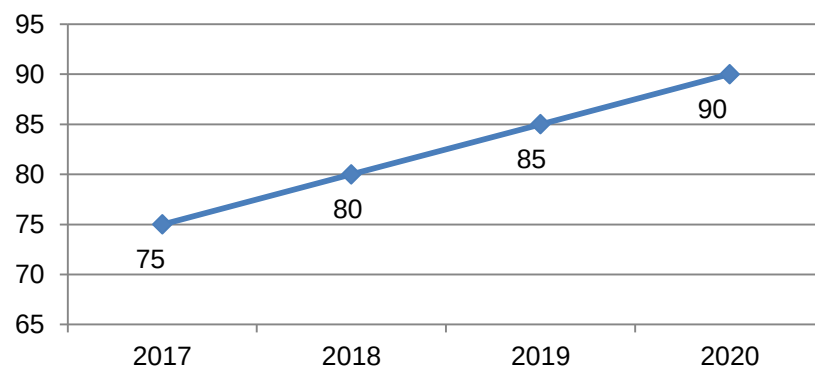
Baiknya kualitas pelaksanaan rencana tidak terlepas dari baiknya penyusunan dan penetapan rencana. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menciptakan perencanaan yang berkualitas. Salah satu upaya yakni dengan meningkatkan indeks kualitas perencanaan yang didapat dari perhitungan 60% capaian sasaran pemerintah kota + 20% capaian sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah. Pada tahun 2020 indeks kualitas perencanaan Pemerintah Kota Batam tercapai 100% dengan capaian realisasi sesuai target yang ditetapkan yakni 90%. Namun capaian ini tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi, antar lain sebagai berikut:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengharuskan Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi.
3. Adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan adanya refocusing anggaran.

4. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah.
5. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
6. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Dalam tahun 2020 realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan mencapai 90%, apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dengan capaian 100% meningkat sebesar 5% tiap tahunnya. Realisasi dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 1
Perkembangan Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2017-2020



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	80,00	85,00	90,00	90,00

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 1.456.708.050,00 dari anggaran sebesar Rp 1.537396.400,00 atau 94,75%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Program dalam mencapai sasaran tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban” dengan 2 (dua) indikator kinerja adalah - 4,81%% dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13

Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2020

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penurunan Pelanggaran K3	50	24	48
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	60	-34,57	-57,62
Rata-rata Capaian			-4,81

Sumber: Bapelitbangda dan Satpol PP Kota Batam

Persentase Penurunan Pelanggaran K3 ini diukur dengan jumlah pelanggaran K3 yang teridentifikasi tahun (n-1) – tahun (n) / jumlah pelanggaran K3 yang teridentifikasi tahun (n-1), dan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda diukur dengan jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi tahun (n-1) – tahun (n) / jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi tahun (n-1).

Selama tahun 2020, jumlah kasus yang berhasil ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebanyak 684 kasus pelanggaran K3 dan 253 kasus terhadap pelanggaran Perda, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 pada pelanggaran K3 berhasil turun 1%, namun kasus pada pelanggaran perda terjadi peningkatan 65 kasus dari sebelumnya 188 kasus atau sebesar 37,16%. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang mana selama masa tersebut adanya larangan Pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan dalam usaha pencegahan penyebaran dan penularan virus Covid-19.

Rendahnya capaian ini, salah satu penyebabnya juga karena penyesuaian atas kebijakan *refocusing* anggaran pada tahun 2020 guna penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 dan tentu saja menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban bagi masyarakat di Kota Batam.

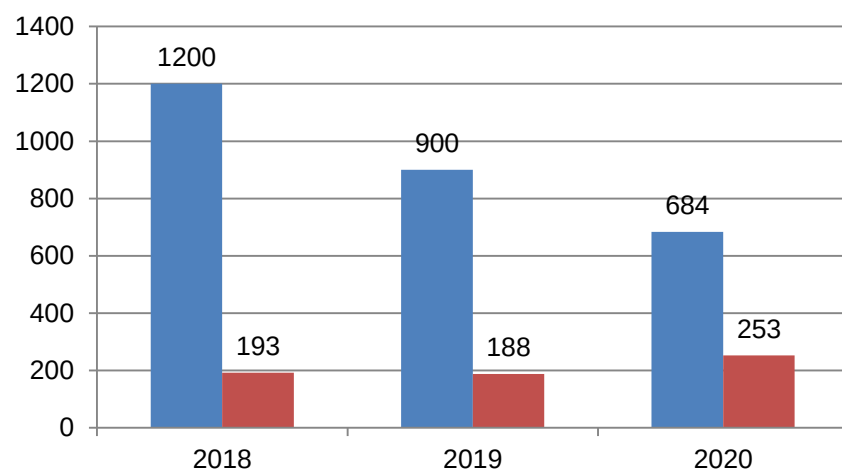
Jumlah kasus pelanggaran masing-masing indikator kinerja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel. 14
Jumlah Kasus Pelanggaran Tahun 2018 - 2020

Indikator kinerja	Tahun		
	2018	2019	2020
Persentase Penurunan Pelanggaran K3	1.200	900	684
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	193	188	253

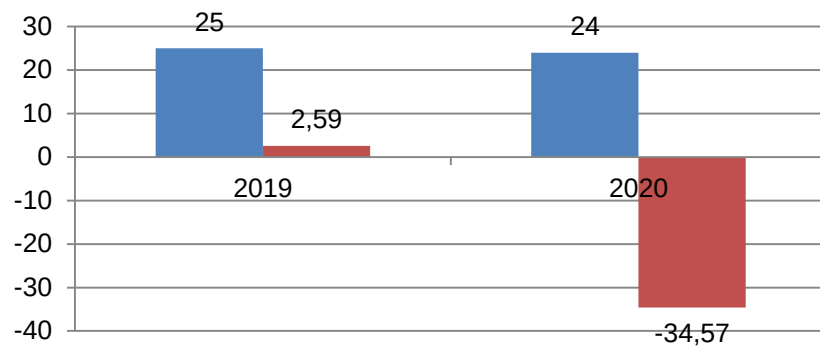
Sumber: Satpol PP Kota Batam

Grafik. 2
Jumlah Kasus Pelanggaran tahun 2018 - 2020



Grafik. 3

Persentase Realisasi Kinerja tahun 2019 - 2020



Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pengamanan dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Kota Batam antara lain TNI dan Polri terhadap aksi-aksi demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lain di lokasi objek vital dan tempat-tempat strategis Pemerintah Kota Batam,. Dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi selama tahun 2020 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindakan anarkis dari demonstran. Berikut tabel daftar pengamanan aksi demonstrasi dan kegiatan-kegiatan di lokasi objek vital dan tempat strategis Pemerintah Kota Batam:

Tabel 15

Daftar Pengamanan Aksi Demonstrasi

No.	Tanggal	Kegiatan	Jumlah Massa	Lokasi	Tuntutan	Ket
1.	09 Januari 2020	Demo Warga	50	Kantor Walikota	Minta Pembayaran ganti rugi kepada PT. si pemilik lahan	Warga Serangrong Kel. Sadai
2.	17 Januari 2020	Demo LSM	30	Kantor Walikota	Meminta Pemko Menindaklanjuti longsor di Tanjung Uma	Badan Pemantau Kebijakan Pendapatan Pembangunan Daerah



3.	20 Januari 2020	Demo Buruh	500	DPRD Kota Batam	• Menolak RUU Omnibus Law • Menolak kenaikan BPJS	FSPMI
4.	10 Februari 2020	Demo Pekerja	60	Kantor Walikota dan Kantor DPRD	• Minta Kejelasan 28 org (PHK); • Perlakukan Sebagai Manusia; • Kembalikan Ijazah yang ditahan RS	Karyawan RS Camathya
5.	12 Februari 2020	Demo Buruh	500	Kantor Walikota dan Kantor DPRD	• Melibatkan Perwakilan SB Pembuatan RUU Omnibus Law; • Menolak RUU Omnibus Law	KSPSI
6.	02 Maret 2020	Demo Buruh	18.000	Kantor Walikota dan Kantor DPRD	• Menolak RUU Omnibus Law; • Persoalan Upah Kerja Sektoral	Aliansi Buruh Bergerak (AB3)
7.	12 Maret 2020	Demo Mahasiswa	50	Kantor Walikota Batam	Evaluasi 4 Tahun Rudi Amsakar	PMII
8.	2 Juli 2020	Demo PP	150	DPRD Kota Batam	Penolakan RUU HIP	Pemuda Pancasila
9.	9 Juli 2020	Demo Gojek	150	DPRD Kota Batam	Pengembalian Skema Poin dan Bonus	Driver Gojek



10.	29 Juli 2020	Demo Ormas	30	DPRD Kota Batam	• Hak Joki Tukar guling akun; • Perubahan sistem aplikasi melibatkan driver • Meminta segera mengirim limbah yang sudah Overload; • Meminta polisi menangkap Anggota DPRD Kota Batam yang menimbun limbah; • Meminta DK Memecat jika terbukti bersalah	Gerakan Pemuda Nusantara DPD II Kota Batam
11.	11 Agustus 2020	Demo Mahasiswa	30	DPRD Kota Batam	Usut perkara Korupsi di Setwan DPRD Kota Batam	Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Batam
12.	12 Agustus 2020	Demo Warga	1.000	Kantor Walikota dan DPRD Batam	• Agar batu Merah menjadi Pemutihan Kampung Tua; • Menuntut memberikan sanksi Lurah Batu Merah	Aliansi Masyarakat Peduli Kampung Tua Batu Merah
13.	27 Agustus 2020	LSM	50	Kantor Walikota Batam	Usut Tuntas Proyek Dinas Kesehatan TA 2017	LSM Suara Rakyat Keadilan



14.	1 September 2020	Demo Warga	50	Kantor Lurah Batu Merah	Meminta Uang Pengukuran Kp. Tua dikembalikan	Warga Batu merah
15	22 September 2020	Demo Buruh	250	Kantor DPRD, BP Batam, Kantor Walikota	• Penyelesaian Hak-hak hukum Toni Saputra dan 15 org; • proses hukum TKA; • Sanksi Operasional PT.Thermo Karya Jaya; • Penolakan RUU Omnibus Law	DPC KSPSI Kota Batam (PT.Thermo Karya jaya)
16	8 Oktober 2020	Demo Buruh (Rencana 3 Hari)	1000	Kantor DPRD, Kantor Walikota	Penolakan UU Omnibus Law	KSPSI, Mahasiswa
17	12 Oktober 2020	Aksi Tutup Mulut	80	DPRD Kota Batam	Penolakan dan Batalkan UU Omnibus Law	PMII, HMI
18	16 November 2020	Demo Buruh	100	Kantor Walikota Batam	Kenaikan UMK Batam	FSPMI
19	17 November 2020	Demo Buruh	100	Graha Kepri	Kenaikan UMK Batam	Garda Metal
20	29 Desember 2020	Demo Buruh	20	Kantor Walikota Batam	Penolakan UU Cipta Kerja	FSPMI

Sumber: Satpol PP Kota Batam

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase Penurunan Pelanggaran K3	Persen	25	24	70
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Persen	2,59	-34,57	70
Rata-rata		13,80	-7,55	70

Sumber: Satpol PP Kota Batam

Berdasarkan data diatas, capaian masing-masing indikator tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 secara berurutan, Persentase Penurunan Pelanggaran K3 adalah 34,29% dan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda sebesar -49,39%. Dan rata-rata capaian sasaran tahun 2020 terhadap rata-rata target akhir RPJMD 2021 sebesar -10,79%. Untuk mencapai sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat melalui kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam dan Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam. Realisasi dana yang digunakan adalah sebesar 247.240.000,00 dari anggaran sebesar Rp 278.775.000.00 atau 88,69%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar -4,81%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan” dengan 1 (satu) indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17

Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kelengkapan administrasi kependudukan	94,5	93,11	98,53

Sumber: Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Batam

Upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan merupakan bagian dari sistem administrasi negara yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terutama dalam hal:

1. Pemenuhan hak asasi orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk (fungsi perlindungan).
2. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa penting kependudukan.
4. Dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal.

5. Dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi atas pelaporan peristiwa penting kependudukan yang dialami penduduk, dengan memperhatikan kaidah registrasi dan diterbitkannya dokumen kependudukan.
6. Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Persentase kelengkapan administrasi kependudukan merupakan rata-rata dari cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun). Pada tahun 2020, berdasarkan data diatas, capaian sebesar 98,53% meningkat 0,46 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 92,65%. Meningkatnya capaian ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan semakin tinggi. Dengan realisasi ini artinya terdapat 754.218 penduduk yang sudah memiliki KTP dibandingkan dengan penduduk wajib KTP Kota Batam sejumlah 776.846 orang. Begitu juga cakupan pada penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun) Kota Batam sebanyak 314.307 orang dibanding dengan jumlah penduduk usia 0 s/d 18 tahun sebanyak 352.636 orang.

Penerbitan KTP tertinggi berada di Kecamatan Belakang Padang yakni 99,09%, dan terendah pada Kecamatan Sagulung sebesar 96,06%. Dan penerbitan akta kelahiran tertinggi pada Kecamatan Batam Kota sebesar 94,46% dan terendah pada Kecamatan Lubuk Baja yakni 86,15%. Realisasi indikator kinerja pada capaian masing-masing cakupan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18

Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2018 – 2020

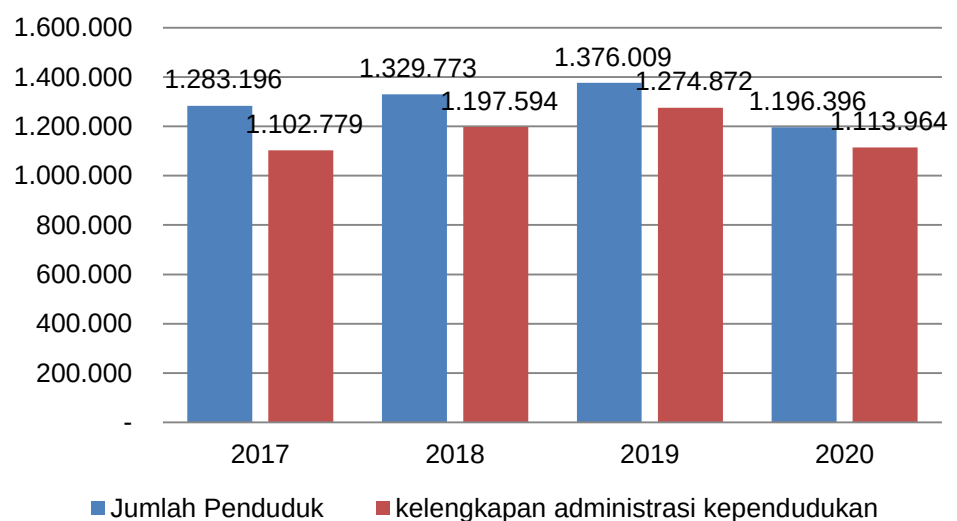
Indikator kinerja	Tahun		
	2018	2019	2020
Cakupan Penerbitan KTP	96,23	97,02	97,09
Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun)	83,89	88,28	89,13
Rata-rata Capaian (Persentase kelengkapan administrasi kependudukan)	90,06	92,65	93,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Batam

Pertumbuhan penduduk dengan jumlah penduduk dengan kelengkapan administrasi kependudukan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 4

Pertumbuhan Penduduk di Kota Batam dibandingkan Kelengkapan Administrasi Kependudukan



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase kelengkapan administrasi kependudukan	Persen	92,65	93,11	97,5

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam

Berdasarkan data diatas, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam terhadap target akhir RPJMD sudah berhasil mencapai 95,50%. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran adalah program penataan administrasi kependudukan dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 3.656.353.112,- dari anggaran sebesar Rp 3.903.985.000,- atau 93,66%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,53%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN YANG BAIK”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Yang Baik” dengan 2 (dua) indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 20
Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,40	13,16	98,21
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	11,6	11,14	96,03
Rata-rata Capaian				97,12

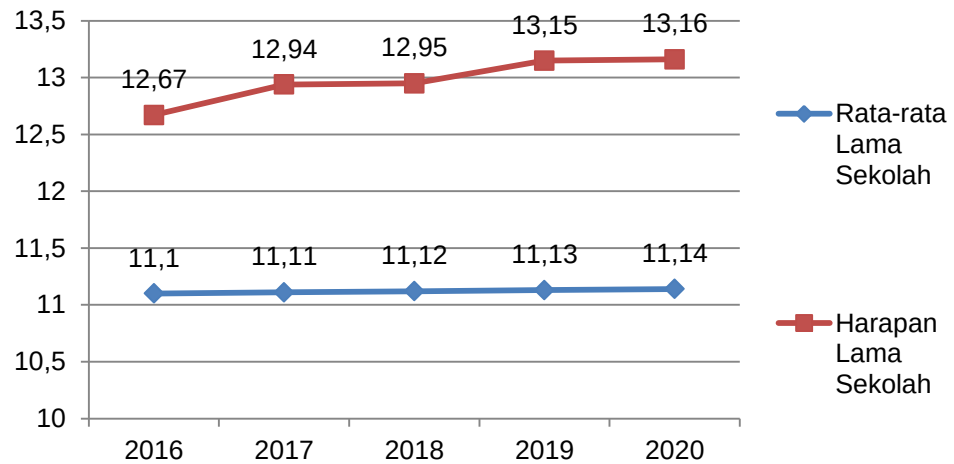
Sumber: BPS Kota Batam

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya **sekolah** (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara **Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Pada tahun 2020, angka Harapan Lama Sekolah Kota Batam terealisasi 13,16 tahun dari target 13,40 tahun, sehingga capaiannya sebesar 98,21%. Dengan capaian ini berarti anak-anak usia 7 tahun di Kota Batam memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sementara angka rata-rata lama sekolah Kota Batam terealisasi 11,14 tahun dari target 11,6 tahun, dengan capaiannya sebesar 96,03%. Rata-rata lama sekolah dari tahun 2016 cenderung meningkat walaupun tidak terlalu signifikan, sehingga dapat menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kota Batam semakin baik, sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik. 5

Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Batam
dari tahun 2016 – 2020



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD
pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 21

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,95	13,15	13,16	13,50
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	11,12	11,13	11,14	12,00

Berdasarkan data diatas, pemerintah Kota Batam telah mencapai 97,48% angka harapan lama sekolah terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021, begitu juga terhadap angka rata-rata lama sekolah, telah mencapai 92,83% dari target akhir RPJMD tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Jumlah sekolah di Kota Batam sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a) TK/RA berjumlah 518 sekolah baik yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Jumlah ruang kelas 1.360, dengan kondisi baik sebanyak 1.327 (97,57%), rusak ringan 33 (2,43%), tidak ada rusak berat.
 - b) SD/MI berjumlah 402 sekolah, terdiri 146 sekolah negeri dan 256 sekolah swasta, yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Dengan jumlah ruang kelas 3.883, yang kondisi ruang kelas baik sebanyak 2.843 (73,22%), rusak ringan 1.029 (26,50%), dan 11 ruang kelas rusak berat (0,28%).
 - c) SMP/MTs berjumlah 189 sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Dengan jumlah ruang kelas sebanyak 1.756, dimana kondisi ruang kelas baik sebanyak 1.181 (67,26%), rusak ringan 565 (32,18%), dan 10 ruang kelas rusak berat (0,57%).
2. Keberadaan guru sekolah dengan kualifikasi kelayakan mengajar meliputi:
 - a) Guru TK/RA berjumlah 1.976 orang, meliputi 74 orang guru negeri dan 1.902 orang guru swasta, yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
 - b) Guru SD/MI berjumlah 7.249 orang, meliputi 2.947 orang guru negeri dan 4.302 orang guru swasta, yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

- c) Guru SMP/MTs berjumlah 3.280 orang, meliputi 1.600 orang guru negeri dan 1.680 orang guru swasta, yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
3. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan BOSDA Propinsi dan BOSDA Kota untuk jenjang pendidikan SD, SMP, yang digunakan untuk pembelian buku, honorarium guru dan pegawai tidak tetap, evaluasi pembelajaran, alat tulis kantor, langganan jasa dan pemeliharaan ringan sarana prasarana.
4. Pembinaan kreativitas siswa baik akademik (Olimpiade Sains, karya tulis ilmiah remaja), maupun non akademik (seni, olah raga).
5. Pemberdayaan kelompok kerja kepala sekolah (SD) dan musyawarah kerja kepala sekolah (SMP) dalam membangun kemitraan dan pendampingan siswa terutama menghadapi sukses ujian nasional, mengatasi kenakalan siswa, dan membangun karakter siswa.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebesar Rp 78.155.986.981,82 dari anggaran sebesar Rp 81.168.115.960,49 atau 96,29%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,12% maka realisasi keuangan sebesar 96,29% terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU DAN MERATA”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau Dan Merata” dengan 1 (satu) indikator

termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 22

Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2020

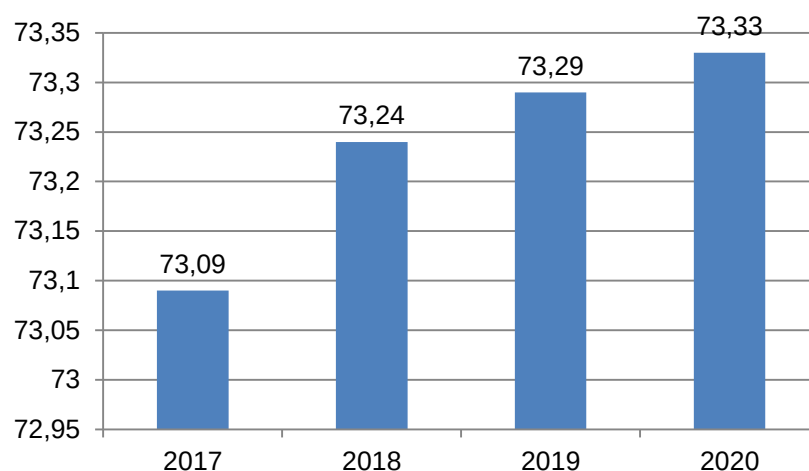
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,80	73,33	100,73

Sumber: BPS Kota Batam

Kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Pada tahun 2020 pencapaian Angka Harapan Hidup di Kota Batam mencapai 100,73% dari target 72,80 tahun dapat terealisasi 73,33 tahun. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata UHH Provinsi yakni 68,88 tahun (data BPS Prov. Kepri).

Grafik. 6

Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2017-2020



Sesuai data diatas, menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Batam terus meningkat setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Usia Harapan Hidup masyarakat antara lain:

1. Kualitas kesehatan masyarakat semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain:

a) Angka kematian ibu pada tahun 2020 berjumlah 18 orang dari 27.581 kelahiran hidup sehingga angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) mencapai 65,41% dari target sebesar 148%. Dengan capaian sebesar 226,27%, hal ini menunjukkan tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu di Tahun 2020 telah berhasil. Berdasarkan hasil audit maternal melalui Otopsi Verbal Maternal, bahwa terjadinya kematian ibu tidak hanya semata disebabkan perdarahan, eklamsi akan tetapi sebagian besar disebabkan oleh penyakit kronis (penyakit bawaan ibu) seperti penyakit Jantung, diabetes, gangguan metabolik yang memperparah kondisi dengan kehamilannya yang berakibat fatal.

b) Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (KH) di Kota Batam selama tahun 2020 sebesar 3.85/1.000 Kelahiran Hidup (106 Kematian bayi). Angka ini lebih baik karena lebih kecil dari target 17%, hal ini menunjukkan bahwa upaya promotif, preventif seperti kelas ibu hamil, kelas ibu balita, akses jaminan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin melalui Jampersal ataupun Jamkesda serta program lainnya dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi.



WaliKota Batam di salah satu lokasi Posyandu

2. Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta sosialisasi hidup sehat dengan olahraga.
3. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
5. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.

Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja yang ditemui dalam pelaksanaan kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

1. Terjadinya pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Sektor kesehatan sangat berperan dalam menghadapi Pandemi Covid 19, termasuk risiko penularan yang sangat tinggi bagi tenaga kesehatan.
2. Akibat pandemi Covid 19, yang berdampak pada ekonomi secara tidak langsung berdampak terhadap masalah kesehatan, seperti gangguan jiwa/depresi, gangguan gizi.

3. Terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang melibatkan msyarakat, terutama pertemuan, rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan tidak maksimal.
4. Belum terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai ketenagaan yang dibutuhkan baik jumlah dan kualitas khususnya 5 (lima) tenaga teknis (Kesehatan Masyarakat, Kesehatan lingkungan, Ahli Gizi, Kefarmasian dan Analis Kesehatan) di Puskesmas;
5. Kurangnya tenaga administrasi di Puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan (perawat, bidan, sanitarian, analis kesehatan dan gizi) merangkap tugas administrasi (bendahara dan administrasi lain), sehingga tugas pokok sebagai tenaga fungsional kesehatan tidak optimal;
6. Sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak optimal terutama dari fasilitas kesehatan swasta.
7. Dampak pandemi dan globalisasi menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular yaitu penyakit diabetes melitus, penyakit kanker, hipertensi dan PTM lainnya karena masyarakat lebih banyak dirumah sehingga kurang aktifitas fisik.
8. Masih ditemukannya kasus gizi buruk (sangat kurus) pada balita ditengah masyarakat sebagai akibat dari multi faktor, penyebab karena masalah gizi buruk merupakan masalah multidimensional seperti ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, pola asuh keluarga, tingkat pendidikan/pengetahuan keluarga tentang gizi, pendapatan keluarga, ketenaga kerjaan dan lain-lain;
9. Masih belum optimalnya pelaksanaan promotif dan preventif terutama di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan langsung pada masyarakat karena terjadinya pandemi Covid 19.

10. Belum optimalnya pencapaian lingkungan sehat, kota sehat dan pemukiman sehat;
11. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring pelayanan kesehatan non pemerintah baik pada pelayanan teknis medis maupun tradisional dan pada pelayanan primer maupun rujukan.

Strategi yang dilakukan dalam permasalahan tersebut antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid 19.
2. Menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 dengan diberlakukan protokol kesehatan dimasyarakat
3. Melakukan advokasi pada stakeholder untuk mendapatkan dukungan penambahan tenaga, anggaran, sarana dan prasarana kesehatan
4. Mengajukan usulan penambahan tenaga administrasi untuk menunjang pengelolaan manajemen administrasi di Puskesmas
5. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kesehatan
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
7. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan mitra kesehatan dalam upaya meningkatkan sistem informasi kesehatan dengan penggunaan Informasi Teknologi
8. Meningkatkan kegiatan skrining dengan memanfaatkan berbagai komunitas dimasyarakat
9. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dengan berbagai strategi media penyuluhan

10. Meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor dan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan gizi masyarakat melalui promosi peningkatan kesehatan
11. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor terkait dengan program kecamatan sehat
12. Meningkatkan akses sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat
13. Meningkatkan akses informasi kesehatan dengan pengembangan media informasi elektronik
14. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan monitoring pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan swasta dan fasilitas kesehatan tradisional.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
3. Program Jaminan Kesehatan Daerah
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
5. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun 2020 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 sebesar 72,90 tahun telah mencapai 100,59% atau sudah melebihi target, sehingga sangat perlu bagi Perangkat Daerah terkait untuk bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan

Pembangunan Daerah melakukan revisi atau peningkatan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 23

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,29	73,33	72,9

Sumber: BPS Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 104.487.130.946,92 dari anggaran sebesar Rp. 125.312.377.114,54 atau 83,38%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,73%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

8. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATKAN KUALITAS PERAN GENDER”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Peran Gender” dengan 2 (dua) indikator termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 24
Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,53	94,42	99,88
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59	58,40	98,98
Rata-rata Capaian				99,43

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Batam

Indeks Pembangunan Gender atau IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perhitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan. Sedangkan perhitungan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam beberapa sektor lainnya seperti ekonomi.

Pada tahun 2020, dari segi pelaksanaan kegiatan yang berbasis pertemuan kepada masyarakat tidak optimal sebagai akibat yang sangat terdampak karena adanya Pandemi Virus Corona Disease (Covid-19), namun dalam

upaya meningkatkan kapasitas SDM perempuan Kota Batam melalui kontribusi dan keikutsertaannya di bidang ekonomi dan pembangunan, Dinas P3APKB Kota Batam mengadakan pelatihan tata rias bagi ibu rumah tangga se-Kota Batam, Pembinaan Akhlak Mulia, dan Sarasehan Organisasi Perempuan dalam rangka peringatan Hari Ibu.

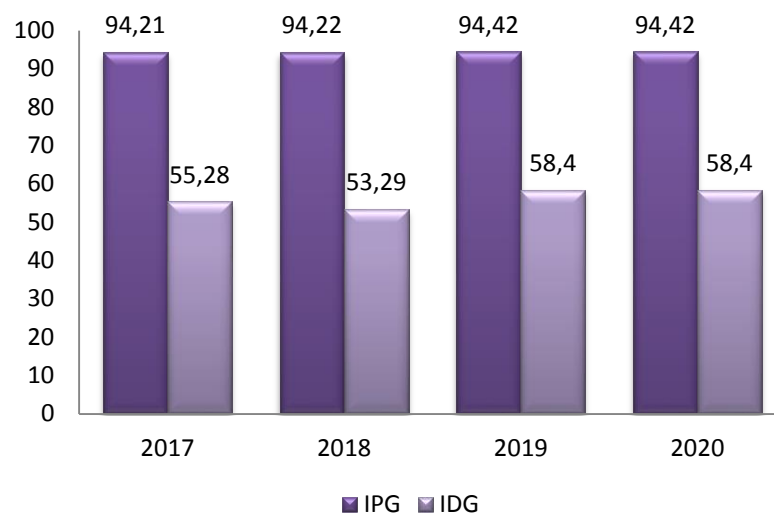
Sejak tahun 2015 penghitungan IPM mengalami perubahan metode, sehingga perubahan ini berdampak pada penghitungan IPG dan IDG. Angka IPG dan IDG dipublikasikan oleh Kementerian PPA melalui buku Pembangunan Manusia berbasis Gender pada setiap tahunnya. Jadi dapat kami sampaikan dalam laporan ini bahwa data yang diberikan adalah berdasarkan hasil penghitungan oleh Badan Pusat statistik (BPS) Pusat tahun 2020, dimana angka IPM Laki-laki dan IPM Perempuan sama-sama mengalami peningkatan. Namun dari sisi capaian pembangunan perempuan lebih tinggi sehingga IPG menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, angka IPG Kota Batam tercatat 94,42 masih sama dengan tahun sebelumnya sebagai akibat perubahan metode perhitungan.

Sementara itu capaian IDG di Kota Batam pada tahun 2020 tercatat sebesar 58,40 masih sama dengan tahun sebelumnya sebagai akibat perubahan metode perhitungan yakni pada tahun 2019 sebesar 58,40. Namun angka IDG Kota Batam masih lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Kepri (61,58). Angka IPG dan IDG Kota Batam pada Tahun dari tahun 2017 - 2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel. 25
Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2017 – 2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,21	94,22	94,42	94,42
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,28	53,29	58,40	58,40

Grafik. 7
Perbandingan IPG - IDG Kota Batam Tahun 2017 – 2020



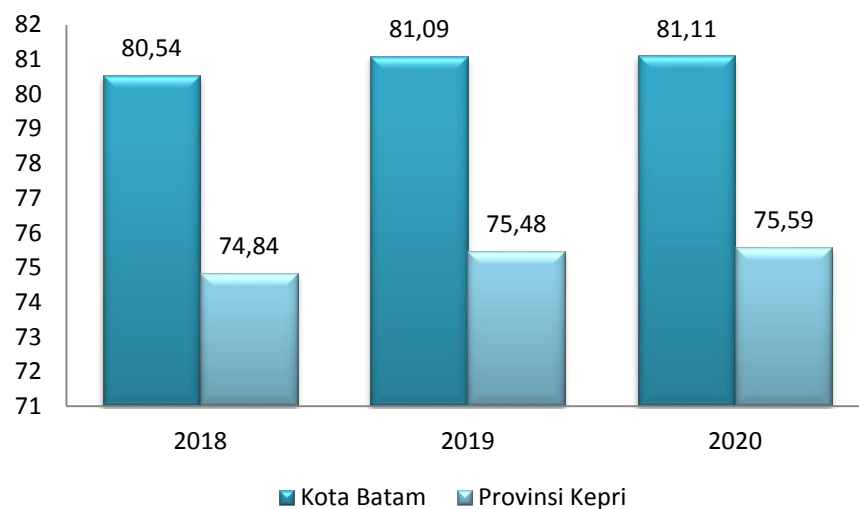
Dalam memahami IPG dan IDG di Kota Batam, tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam berupaya terus melakukan peningkatan melalui pemberdayaan masyarakat agar tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Hasil upaya tersebut dapat digambarkan didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

Tabel. 26
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tahun 2018 – 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun		
	2018	2019	2020
	80,54	81,09	81,11

Berdasarkan data diatas, capaian IPM Kota Batam terus meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 capaian IPM Kota Batam ini berada pada peringkat 1 se Provinsi Kepri, peringkat 4 se Sumatra dan berada pada peringkat ke-23 se Indonesia, Perbandingan IPM Kota Batam Tahun 2020 dengan Provinsi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 8
Perbandingan IPM Kota Batam Tahun 2020 dengan Provinsi



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 27

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,52	94,42	94,54
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	57	58,40	61,05

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Batam

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan dan Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 757.584.400,00 dari anggaran sebesar Rp 1.020.514.400,00 atau 74,24%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,43%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

9. Analisis Kinerja Sasaran “PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 96,84% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 28
Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2020

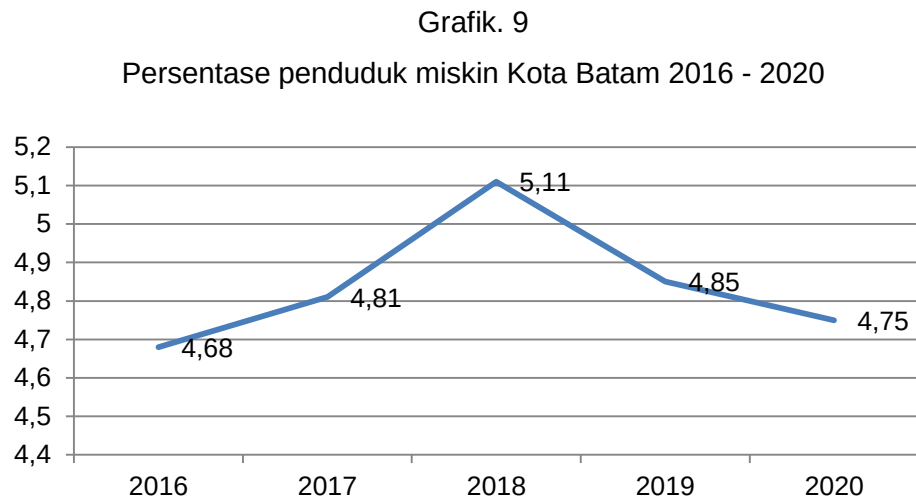
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Kemiskinan (Penduduk Miskin)	%	4,6	4,75	96,84

Sumber: BPS Kota Batam

Persentase tingkat kemiskinan yang diukur pada sasaran ini adalah persentase penduduk di Kota Batam yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu 4,75%, dengan target 4,6% maka capaiannya sebesar 96,84%. Dari angka ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Batam ada sebanyak 67,06 juta dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 707.456,00.

Hal inilah yang menjadi permasalahan Kota Batam dalam hal kemiskinan, yaitu bukan pada tingginya angka kemiskinan karena angka kemiskinan Kota Batam merupakan paling rendah se-Provinsi Kepri, melainkan pada besarnya jumlah penduduk miskin. Hal ini terjadi disebabkan pertumbuhan penduduk juga disertai dengan pertumbuhan penduduk miskin, walaupun pertumbuhan penduduk miskin ini masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kota Batam lebih banyak dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk dibandingkan dengan faktor lainnya (kelahiran dan kematian). Dengan demikian, permasalahan kemiskinan makro Kota Batam masih terkait dengan permasalahan kependudukan sehingga jika dilihat dari penurunan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi *Covid-19* tidak

memiliki pengaruh pada persentase penduduk miskin dikarenakan permasalahan penduduk tersebut diatas, perkembangan persentase penduduk miskin Kota Batam dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 29
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase Tingkat Kemiskinan	%	5,11	4,85	4,75	4,5

Sumber: BPS Kota Batam

Berdasarkan data diatas dengan pencapaian pada tahun 2020 terhadap target RPJMD Persentase penduduk miskin Kota Batam telah berhasil mencapai 95%. Capaian ini didukung dengan program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah

sebesar Rp 77.663.270.838,20 dari anggaran sebesar Rp 183.139.442.150,00 atau 42,41%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,84%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

10. Analisis Kinerja Sasaran “MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 51,74% dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 30
Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat pengangguran terbuka	%	6,1	11,79	51,74

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Semakin besar angka Tingkat Kesempatan Kerja, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka justru menunjukkan semakin tingginya orang yang tidak bekerja disuatu wilayah atau menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja fokus pada pemberian dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang tidak mempunyai lapangan kerja dan pelaku industri dengan berupaya menciptakan inovasi dan pembekalan bagi tenaga kerja. Sehingga diharapkan masyarakat yang tidak

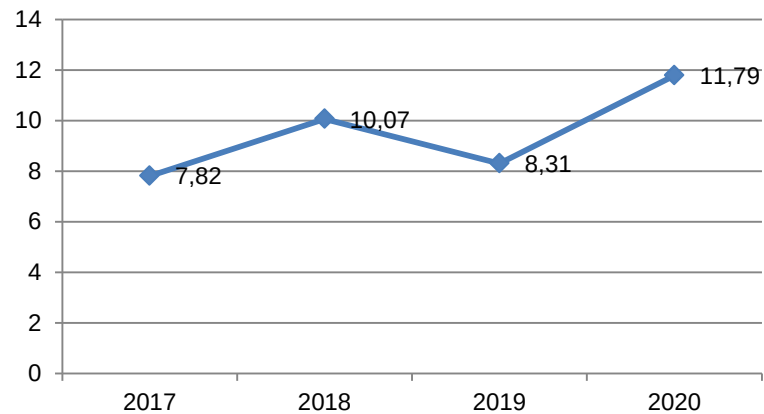
mempunyai lapangan kerja dapat mempunyai ketrampilan dan mampu mendapatkan lapangan pekerjaan atau mendirikan usaha sendiri, sedangkan bagi pelaku industri diharapkan dapat mengembangkan usahanya sehingga menambah tenaga kerja yang secara otomatis menambah jumlah lapangan kerja baru.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam pada tahun 2020 berada pada tingkat 11,79% dari target 6,1% maka capaian kinerja adalah 51,74% atau terdapat 87.903 orang pengangguran yang ada di Kota Batam yang tidak terserap pada pasar kerja dibandingkan dari jumlah angkatan kerja sebanyak 745.545 orang. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 8,31% maka Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 lebih besar atau terjadi peningkatan sebesar 3,48%. Rendahnya capaian sasaran ini disebabkan berbagai faktor diantaranya banyaknya perusahaan yang tutup dan tidak membuka lowongan. Faktor lain yang menjadi pemicu utama adalah terjadinya wabah penyakit covid-19 di Indonesia yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian tidak hanya di Indonesia melainkan seluruh dunia. Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) menyebutkan bahwa jumlah kasus kematian karena Coronavirus sudah meningkat dan meluas antar wilayah dan antar negara serta memiliki dampak pada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 sampai tahun 2020 di Kota Batam dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 10

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2017 - 2020



Apabila dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2021 pencapaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 telah mencapai 50,89% dari target 6%. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Batam untuk menekan angka pengangguran dengan lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan ketrampilan bagi masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan keahlian.

Sasaran “Mengurangi Angka Pengangguran” tersebut dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dengan realisasi anggaran yang sebesar Rp 8.556.308.000,00 dari anggaran sebesar Rp 8.656.340.000,00 atau 98,84%. Realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 51,74% belum terdapat efisiensi yang optimal atas penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

11. Analisis Kinerja Sasaran “TERLAKSANANYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA YANG KONSISTEN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Yang Konsisten” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,10% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 11 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 31
Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tata kota dengan RTRW	%	95	95	100

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Dari total Ruang terbuka Hijau (RTH) eksisting di Kota Batam dengan luas wilayah darat Kota Batam 108.778,09 Ha dan luas kawasan hutan sebesar 42.291 Ha maka RTH ideal untuk Kota Batam adalah 19.946,13 Ha dan sebesar 10.912,32 Ha diantaranya adalah luasan wilayah RTH Publik yang tersedia di wilayah kota (kawasan). RTH Kota merupakan bagian terbuka dari suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi). Manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang didapatkan dari RTH dalam kota yakni adanya keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan. Dalam usaha memelihara dan meningkatkan kualitas RTH publik yang

berkelanjutan, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan beberapa kegiatan antara lain, pengaturan mengenai kegiatan pemanfaatan dan pemantauan serta pengendalian ruang. Peraturan yang digunakan saat ini adalah Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Kawasan Batam, Bintan Karimun, ini disebabkan Perda RTRW Kota Batam sampai saat ini belum disahkan sehingga Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2004-2014 yang meliputi pengaturan peruntukan matra darat dan laut dalam satu kesatuan integral dianggap kurang sesuai lagi terhadap pesatnya perumbuhan dan dinamika kegiatan masyarakat Kota Batam saat ini.

Penataan Kesesuaian dalam pemanfaatan ruang berdasarkan Perda RTRW Kota Batam No. 2 Tahun 2004 dan Perpres No 87 Tahun 2011 dalam membangun diukur berdasarkan Keterangan Rencana Kota (KRK) sebagai pengganti fatwa planologi yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan jumlah titik menara yang direkomendasikan merupakan salah satu komponen yang dapat mengukur tingkat kepatuhan membangun yakni untuk kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Instansi terkait. Berikut daftar dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dihasilkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama Tahun 2020.

Tabel. 32
Rekapitulasi Dokumen Tata Ruang

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Ket
1.	Rekomendasi Keterangan Rencana Kota (KRK)	293 Dokumen	Se-Kota Batam
2.	Dokumen Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam dan Peraturan Zonasi	1 Dokumen	7 Kecamatan
3.	Aplikasi Informasi Administrasi KRK (E-KRK) dan Pemanfaatan)	1 Dokumen	-
JUMLAH		295 Dokumen	-

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini yakni Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Pengawasan bangunan dan Menara secara kontinyu guna membangun kesadaran masyarakat dalam hal membangun sesuai Tata Ruang dan IMB. Pengawasan rutin yang dilakukan dapat berupa memberikan surat teguran/peringatan bagi yang tidak sesuai aturan. Selain itu keterlibatan masyarakat dari perangkat terkecil yakni RT/RW, pihak Kelurahan sampai Kecamatan merupakan sarana yang sangat efektif menyampaikan pesan dan informasi mengenai kesesuaian dalam membangun sesuai dengan Tata Ruang, dengan informasi yang segera disampaikan maka cepat juga tim akan melakukan tindak pengendalian untuk ditindaklanjuti. Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 33

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tata kota dengan RTRW	%	85	90	95	95

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian pelaksanaan sasaran ini melalui program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp, 278.505.000,00 dari anggaran sebesar Rp 318.458.000,00 atau 87,45%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

12. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 104,98% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 12 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 34

Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	%	66	69,29	104,98

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

KLH (Indeks **Kualitas Lingkungan Hidup**) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi **lingkungan hidup** pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam didapat dari 30% IKA + 30% IKU + 40% IKTL, dimana $IKA = \text{square root } (Ci/Lij)^2 \text{ rata-rata} + (C1/Lij)^2 \text{ Maksimum}/2$, $IKU = 100 - (50/0.9 \times (leu - 0.1))$, $IKTL = 100 - ((84.3 - (THX100)) \times 50/54.3)$.

Capaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat” mencapai 104,98% dengan realisasi sebesar 69,29% dari target yang ditetapkan 66%. Namun data ini masih angka prediksi, hal ini dikarenakan ada data indikator yang belum rilis untuk tahun 2020 yaitu untuk Indikator Kualitas Air, selain itu terdapat indikator terkelolanya kawasan konversi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penopang usaha perikanan dan jasa kelautan secara berkelanjutan dimana indikator ini sudah menjadi kewenangan provinsi sesuai PP No.18 Tahun 2016. Dimana hal ini yang menjadi salah satu dasar hukum pada rancangan perda perubahan RPJMD Kota Batam 2016-2021 yang diusulkan pada tahun 2019.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun 2020 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 sebesar 67 tahun telah mencapai 103,42% atau sudah melebihi target, sehingga sangat perlu bagi Perangkat Daerah terkait untuk bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah melakukan revisi atau peningkatan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 35

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	%	64	65	69,29	67

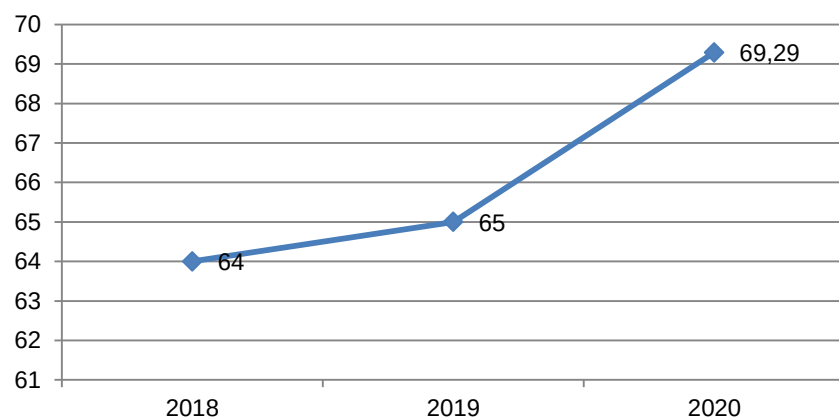
Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Berdasarkan data diatas, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 11

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam

Tahun 2018 - 2020



Pencapaian pelaksanaan sasaran ini melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Program Lingkungan Sehat dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 817.299.614,00 dari anggaran sebesar Rp 896.367.592,00 atau 91,18%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,98%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

13. Analisis Kinerja Sasaran “TERSEDIANYA PENGELOLAAN SAMPAH PADA TINGKAT KOTA DAN KECAMATAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tersedianya Pengelolaan Sampah Pada Tingkat Kota Dan Kecamatan Yang Berwawasan Lingkungan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 13 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 36

Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	%	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Kinerja sasaran ini dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah, Penanganan Kebersihan Jalan, Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan, serta Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur. Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, pada tahun 2020 ini diketahui penyelenggaraan pelayanan sebagaimana disebutkan sebelumnya dilaksanakan dengan menghitung beberapa kegiatan, antara lain volume sampah yang terangkut ke TPA adalah 794 ton per hari dari target 1.153 ton per hari, penanganan kebersihan jalan dari target 200 lokasi terealisasi sebanyak 200 lokasi, dan panjang pembersihan drainase, parit dan selokan yang dibersihkan mencapai 440 Km dari target 440 Km, begitu pula Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur dengan target 90% dapat terealisasi 90%, sehingga semua capaian kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini mencapai 100%.

Hal-hal yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam pencapaian sasaran sehingga capaian pelayanan berhasil antara lain:

1. Melakukan pemanfaatan sampah dengan gerakan 3R (Reuse, Reduce, Recycle).

Reuse adalah penggunaan kembali sampah yang masih dapat digunakan kembali baik untuk fungsi yang sama maupun dalam fungsi yang lain.

Reduce berarti mengurangi penggunaan sesuatu yang dapat menjadi sampah.

Recycle yakni melakukan daur ulang atau pengolahan kembali sampah sehingga menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan dengan membentuk Bank Sampah di setiap Kecamatan.

2. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pengolahan atau daur ulang sampah pasar sehingga tidak terjadi penumpukan di TPA.
3. Melalui gerakan pengangkutan sampah sebagai hasil gotong royong, sapu jalan, pembersihan drainase, taman dan lokasi yang tidak terangkut oleh mitra Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung pemenuhan target volume sampah.
4. Adanya dukungan oleh Mitra Dinas Lingkungan Hidup melalui Jasa Transporter

Pencapaian pelaksanaan sasaran ini melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 40.135.652.016,00 dari anggaran sebesar Rp 48.062.713.640,00 atau 83,51%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Capaian Sasaran ini terhadap RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 37

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase Pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	%	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun 2020 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 telah mencapai 100%, sehingga sangat perlu bagi Perangkat Daerah terkait untuk bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah melakukan revisi atau peningkatan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD.

14. Analisis Kinerja Sasaran “TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG TERPADU DAN NYAMAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tersedianya Infrastruktur Perkotaan Yang Terpadu Dan Nyaman” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 69,48% dan termasuk predikat “**Cukup Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 14 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 38

Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum	%	17,02	-0,52	-3.06%
Persentase jalan dalam kondisi baik	%	78	86,97	111,5%
Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir	Titik	15	15	100%
Total				69,48

Sumber: Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penumpang yang diangkut diperoleh dari jumlah penumpang Bus Trans Batam, Bus Sekolah, Kapal dan Speedboat yang melayani masyarakat baik mainland maupun hinterland. Tahun 2020 karena Pandemi Covid-19 melanda mulai bulan Maret 2020, jumlah bus yang beroperasi mengalami pengurangan yang semula Bus Trans Batam yang beroperasi dalam sehari sebanyak 52 Unit berkurang menjadi 32 Unit, Bus Sekolah mengalami pemberhentian operasi sejak Maret 2020 karena mengikuti jadwal sekolah yang diliburkan oleh Pemerintah. Sehingga Jumlah yang diangkut selama tahun 2020 berjumlah 1.313.241 dengan rincian sesuai tabel berikut :

Tabel. 39

Jumlah Penumpang Yang Di Angkut Tahun 2017 - 2020

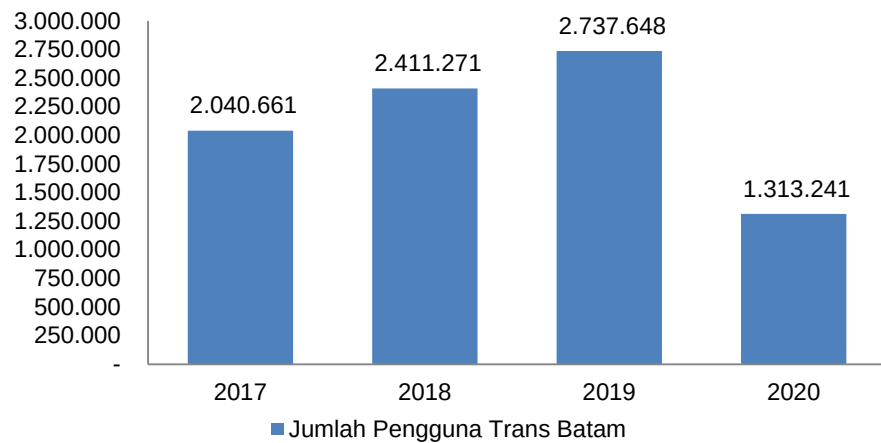
Jenis Angkutan	Jumlah Penumpang per tahun			
	2017	2018	2019	2020
Trans Batam	2.019.603	2.388.718	2.647.305	1.265.961
Bus Sekolah	778	2.273	65.250	31.770
Kapal	20.280	20.280	25.093	15.510
Total	2.040.661,00	2.411.271,00	2.737.648,00	1.313.241,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Perbandingan jumlah penumpang yang diangkut dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 12

Jumlah penumpang yang di angkut Tahun 2017 – 2020



Apabila realisasi indikator kinerja sasaran per tahun 2020 dibandingkan terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 40

Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 14 terhadap target RPJMD

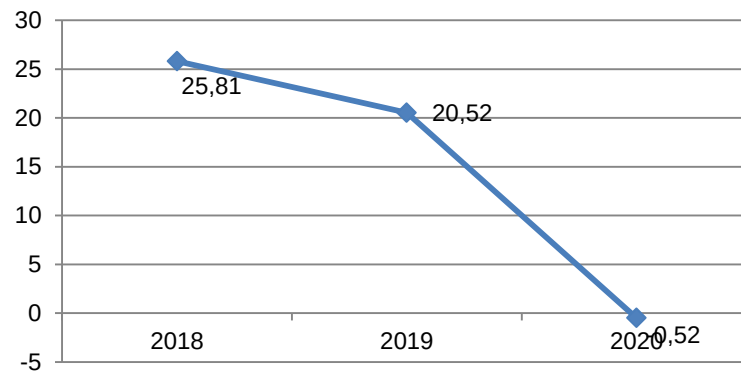
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum	%	25,81	20,52	-0,52	14,55

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Pada indikator Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terlihat tren terus menurun, dan pada tahun 2020 penurunan terjadi akibat adanya pandemi covid-19 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik. 13

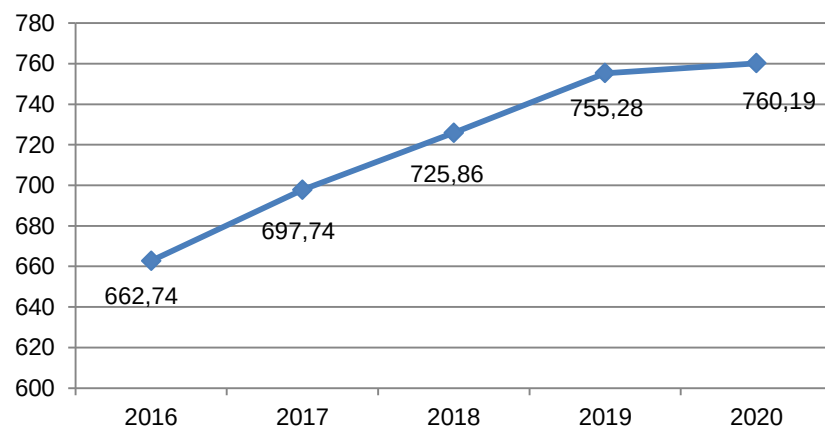
Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum
di Kota Batam dari tahun 2018 – 2020



Program yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator ini melalui “Program Penyediaan dan Penataan Tata kelola Transportasi massal” dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.495.064.718,02 dari anggaran sebesar Rp 20.518.076.229,62 atau 90,14%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar -3.06%, maka penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator tersebut tidak efisien, namun rendahnya pencapaian ini juga dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam mengurangi aktivitas di luar rumah mengingat tahun 2020 adalah tahun yang berat dan tidak mudah dilalui oleh masyarakat akibat Pandemi COVID–19, dan Pemerintah harus tetap hadir dalam memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat, dan menyikapi hal ini dalam rangka ikut mencegah penyebaran virus tersebut maka jumlah bus yang beroperasi mengalami pengurangan yang semula Bus Trans Batam yang beroperasi dalam sehari sebanyak 52 Unit berkurang menjadi 32 Unit, Bus Sekolah mengalami pemberhentian operasi sejak bulan Maret 2020 karena menyesuaikan mengikuti jadwal sekolah yang diliburkan karena ketentuan Pemerintah.

- b. Pada indikator Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2020, peningkatan capaian kinerja ini menunjukkan bahwa panjang jalan yang berfungsi baik di Kota Batam bertambah sepanjang 4,91 km menjadi 760,19 km dibandingkan panjang jalan yang berkondisi baik pada tahun 2019 yakni 755,28 km. Dan capaian kinerja pada indikator Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2020 adalah sebesar 111,5%. Terhadap keseluruhan panjang jalan Kota Batam sebesar 882,57 km pencapaian ini sudah mencapai 86,13%. Adapun peningkatan jalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 14
Peningkatan Panjang Jalan yang berfungsi Baik
Tahun 2016 – 2020



Peningkatan/Pembangunan Jalan Kota Batam

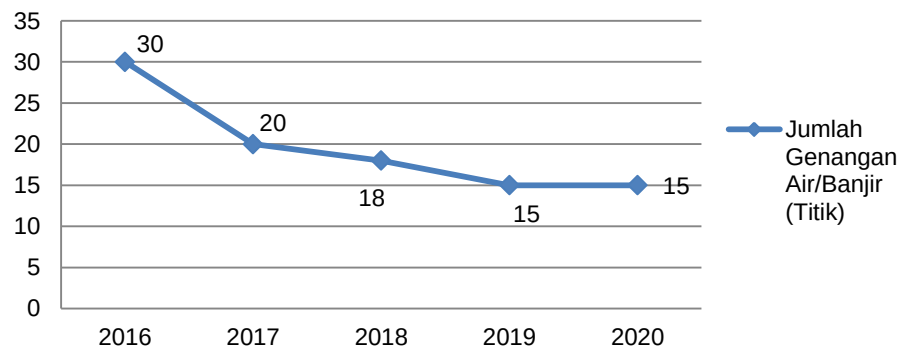
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah Pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam kondisi baik melalui kegiatan pemeliharaan jalan selama tahun 2020 sepanjang 48 km, termasuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan/ pelantar daerah hinterland.

Indikator ini dicapai melalui Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar dan Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Hinterland. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator ini sebesar Rp 47.231.968.147 dari anggaran sebesar Rp 49.702.842.305,50 atau 95,03%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111,5%, maka penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator efisien.

- c. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini dihitung dari Jumlah titik genangan air/banjir di Kota Batam yakni 30 titik sebagai *baseline*. Pada tahun 2020 jumlah titik banjir yang mampu ditangani sebanyak 15 titik dari target 15 titik genangan air/banjir, sehingga hasil penurunan titik banjir yang berhasil ditangani sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 maka penanganan titik banjir tidak berubah karena pada tahun 2020 penanganan titik banjir mencapai 15 titik. Apabila dibandingkan dengan *baseline* titik banjir, pencapaian Pemerintah Kota Batam sudah berhasil mencapai 50%, sementara pencapaian kinerja terhadap target akhir RPJMD, di tahun 2020 ini telah mencapai sebesar 73,33%.

Perkembangan pencapaian penanganan jumlah titik banjir pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kota Batam dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 15
Perkembangan penanganan titik banjir Kota Batam
tahun 2016 – 2020



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator adalah Pembangunan dan peningkatan kuantitas drainase pada tahun 2020 sepanjang 52.000 meter; termasuk juga pemeliharaan dalam peningkatan fungsi drainase serta penanganan abrasi pantai.

Indikator ini dicapai melalui Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan dengan realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp 12.894.849.150,00 dari anggaran sebesar Rp 13.184.160.316,00 atau 97,81%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya. Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 41

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

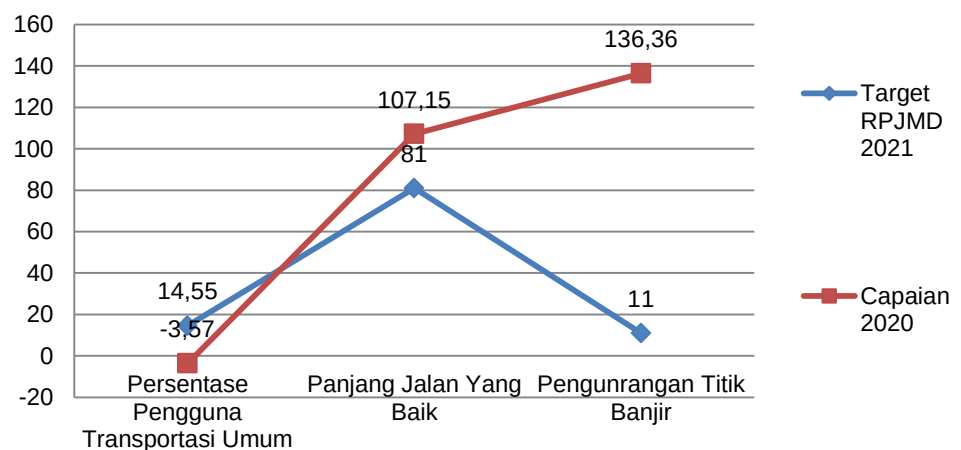
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum	%	20,52	-0.52	14,55
Persentase jalan dalam kondisi baik	%	76	86,79	81
Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir	titik	18	15	11

Sumber: Bapelitbangda, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam

Berdasarkan data diatas, pencapaian 3 indikator terhadap target RPJMD secara berurutan adalah -3,57, 107,15 dan 136,36, dan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 16

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran terhadap RPJMD



Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp 78.621.882.015,02 dari anggaran sebesar Rp 83.405.078.851,12 atau 94,27%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja

sasaran sebesar 69,48%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya. Seperti dijelaskan sebelumnya hal ini terjadi karena Pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan Pemerintah dalam mencegah penyebaran dan penularan yang lebih tinggi. Namun pada indikator tertentu dipandang sangat perlu bagi Perangkat Daerah terkait bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah untuk melakukan revisi atau peningkatan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD.

15. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tercukupinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Wilayah Hinterland” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 104,54% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 15 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 42

Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	85,77	89,66	104,54

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Kota Batam tahun 2019 tercatat jumlah rumah tidak layak huni di Kota Batam adalah sebanyak 36.402 rumah. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan berbagai program untuk

menunjang pengurangan jumlah rumah tidak layak huni baik yang merupakan program dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Batam, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 1.005 rumah dari tidak layak huni menjadi rumah layak huni, menyebabkan penurunan jumlah tidak layak huni menjadi 35.397 rumah. Secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 11,30% dari basis data terpadu tahun 2019. Terhadap target di akhir RPJMD, pencapaian kinerja ini sudah mencapai 103,75% dari target yang ditetapkan sebesar 86,42%.

Rincian data capaian terhadap jumlah rumah tidak layak huni dan peningkatan persentase rumah layak huni dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 43

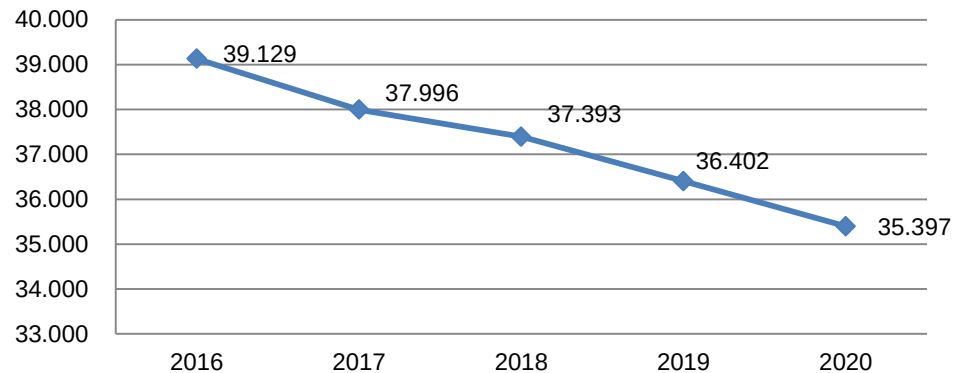
Data capaian berdasarkan Basis Data Terpadu 2015

data BDT tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020
39.901	772	1.133	603	991	1.005
	39.129	37.996	37.393	36.402	35.397
	0,019	0,048	0,063	0,088	0,113
	1,93%	4,77%	6,29%	9,00%	11,30%

Perkembangan pencapaian penurunan rumah tidak layak huni dan persentase rumah layak huni pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kota Batam dapat dilihat pada grafik-grafik berikut:

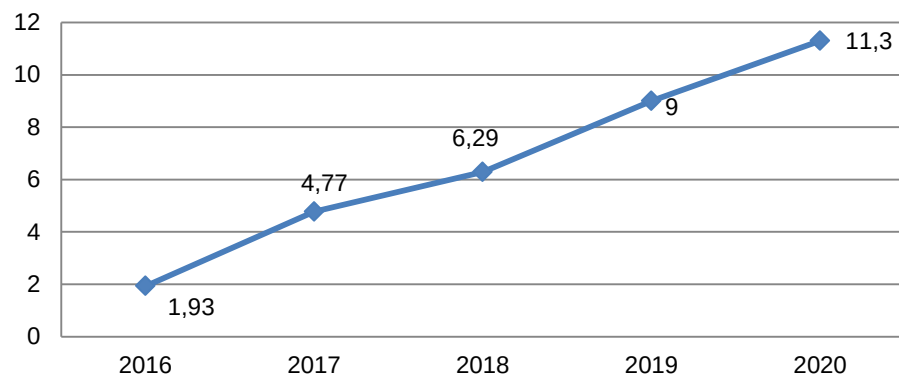
Grafik. 17

Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam
tahun 2016 – 2020



Grafik. 18

Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam
tahun 2016 – 2020



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau sehingga terjadi *backlog* kebutuhan rumah di Kota Batam.
2. Kebutuhan yang besar akan pemenuhan peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak diimbangi kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah sehingga intervensi yang dilakukan belum signifikan.

3. Kelembagaan pembiayaan perumahan terutama untuk rumah subsidi belum terjangkau untuk semua masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat untuk dukungan pendanaan melalui bantuan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Upaya penambahan satuan rusun dengan bantuan pembangunan twinblok rusunawa baru.
3. Bantuan dari pemerintah provinsi untuk bantuan peningkatan RTLH di Kota Batam.

Berdasarkan data diatas, capaian Sasaran ini terhadap RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 44

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	89,33	89,66	86,42

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Sasaran ini dicapai melalui Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan serta Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana di Hinterland dengan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 76.165.185.920,38 dari anggaran sebesar Rp 95.785.170.282,64 atau 79,52%. Realisasi keuangan sebesar 79,52% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,54%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Namun pada pencapaian sasaran ini dipandang sangat perlu bagi Perangkat Daerah terkait bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah untuk melakukan revisi atau peningkatan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD.

16. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian Dan Perdagangan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 80,51% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 16 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 45

Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian	%	42,94	34,57	80,51

Sumber: Bapelitbangda dan Disperindag Kota Batam

Pengukuran Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian didapat dari penghitungan $0,45 \times \text{kinerja pembinaan perdagangan} + 0,35 \times \text{kinerja penataan pasar} + 0,20 \times \text{kinerja pembinaan IKM}$. Pada kinerja pembinaan perdagangan melalui indikator Persentase Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan dan Persentase Tertib Ukur dengan masing-masing target sebesar 10% terealisasi secara berurutan 11,48% dan 8,91%, sehingga didapat rata-rata capaian adalah sebesar 101,95%. Pada kinerja penataan pasar diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pasar dengan target yang ditetapkan adalah 71% dan terealisasi 71% sehingga capaian yang didapat adalah 100%. Sementara kinerja pembinaan IKM diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah dengan target 24,75% dan terealisasi sebesar 10,34% dengan capaian 42,08%. Berdasarkan data-data tersebut maka Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian tahun 2020 terealisasi 34,57%, dari target yang ditetapkan sebesar 42,94% maka capaian indeks ini adalah sebesar 80,51%.

Pencapaian kinerja diatas adalah keberhasilan Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkatkan perekonomian, antara lain:

1. Dengan melaksanakan pola kerjasama swasta sehingga tidak membebani Anggaran Pemerintah Kota Batam, yakni :
 - Pembentukan Pasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
 - Kerjasama Pengaturan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar bersama Pertamina dan Bank Rakyat Indonesia dengan menggunakan kartu Brizzi

- Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 melalui kerjasarna dengan Distributor dan Pengelola Pasar se Kota Batam
 - Kedasarna Go-Jek melalui program IKM Batam Go-Digital yang dituangkan dalam Mou (urnlah binaan 160 IKM)
 - Ke{asama Penerapan Transaksi Non Tunai di Pasar-pasar melalui QRIS dengan Bank Jabar
2. Melalui Kegiatan Dekranasda Kota Batam, 6 (enam) motif Batik Batam telah mendapatkan sertifikat Hak Cipta yang diterbitkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta menyikapi perkembangan ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dapat berjalan dengan baik terutama dalam rangka pemulihan ekonomi Pasca pandemi Covid-19. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Meningkatkan inovasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait Gudang Pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah;
2. Mengembangkan komunikasi dan pengoordinasian dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait kewenangan yang terbatas pada Kabupaten/Kota, namun langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti di urusan bidang energi dan sumber daya mineral (BBM, LPG, dan Kelistrikan);

3. Aktif melakukan pengoordinasian dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam dalam mengendalikan inflasi terhadap bahan kebutuhan pokok;
4. Mengembangkan Sentra Industri Mandiri yang berwawasan lingkungan;

Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap target RPJMD telah mencapai 64,74% sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel. 46

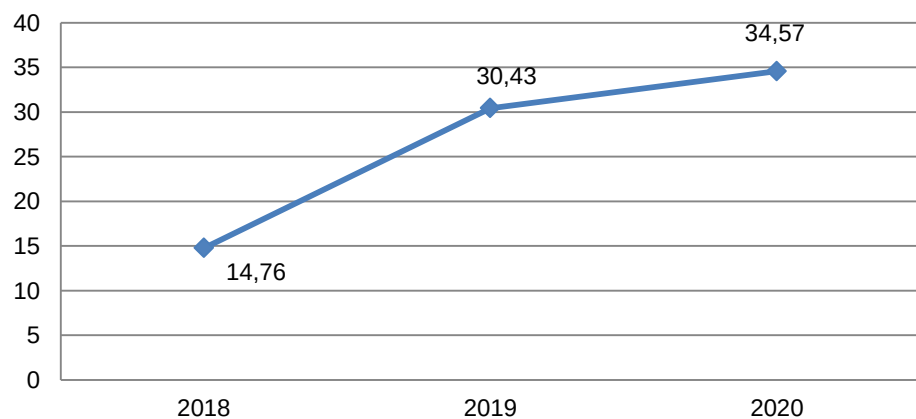
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian	%	14,76	30,43	34,57	53,4

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Grafik. 19

Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam
tahun 2018 – 2020



Sasaran ini dicapai melalui beberapa program antara lain Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Program Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Pasar serta Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 1.896.469.244,00 dari anggaran sebesar Rp 2.742.402.460,00 atau 69,15% dari anggaran. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 80,51%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

17. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Pengembangan Pariwisata” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 17 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 47

Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Length of Stay (Lama Kunjungan)	hari	2,09	2,09	100

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batam

Pencapaian kinerja pada indikator Length of Stay (Lama Kunjungan) yang dimaksud pada laporan ini adalah Wisatawan mancanegara yang

mengunjungi Kota Batam di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu

1. Wisatawan (*tourist*)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit dua puluh empat jam, akan tetapi tidak lebih dari dua belas (12) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: berlibur, rekreasi dan olahraga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.

2. Pelancong (*Excursionist*)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan rata-rata lamanya tamu menginap di Kota Batam adalah banyaknya malam tempat tidur yang terpakai (malam tamu) dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel atau akomodasi lainnya. Rata-rata tersebut menurut bulan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel. 48

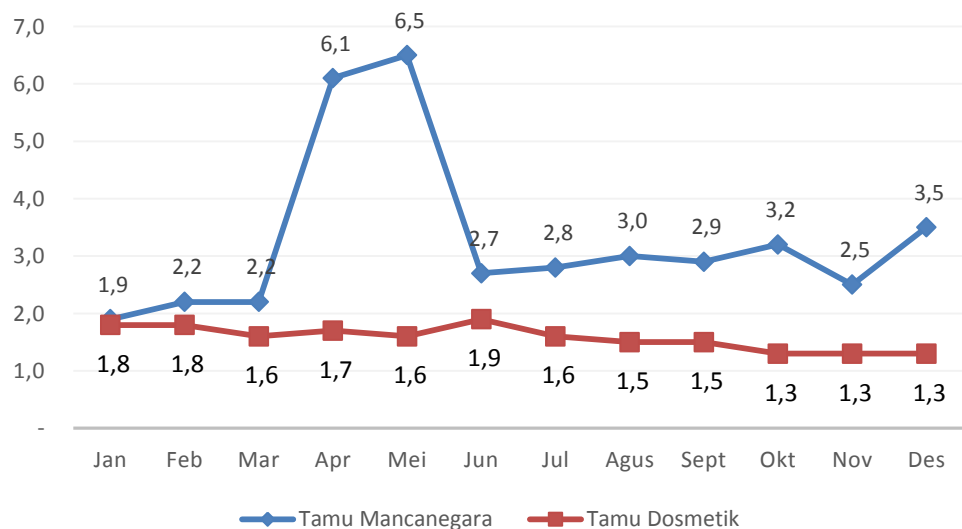
Rata-rata lama tamu menginap di Kota Batam Tahun 2020

Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik
Januari	1,9	1,8
Februari	2,2	1,8
Maret	2,2	1,6
April	6,1	1,7
Mei	6,5	1,6
Juni	2,7	1,9
Juli	2,8	1,6
Agustus	3,0	1,5
September	2,9	1,5
Oktober	3,2	1,3
November	2,5	1,3
Desember	3,5	1,3

Rata-rata lamanya tamu menginap di Kota Batam pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 20

Rata-rata lamanya tamu menginap di Kota Batam pada tahun 2020



Pada tahun 2020, seperti diketahui pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan instruksi Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang digunakan dalam program percepatan penanggulangan covid-19 menyebabkan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga secara garis besar juga mengalami penurunan. Ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan kinerja di lingkup kepariwisataan.

Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap target RPJMD telah mencapai 98,12% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 49

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Length of Stay (Lama Kunjungan)	Hari	2,01	2,05	2,09	2,13

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencapai sasaran ini melalui Program Pengembangan Sektor Pariwisata dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 1.354.977.200,00 dari anggaran sebesar Rp 1.637.030.500,00 atau 82,77%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan

capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

18. Analisis Kinerja Sasaran “PENINGKATAN INVESTASI KOTA BATAM”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Peningkatan Investasi Kota Batam” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 582,83% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 18 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 50

Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2020

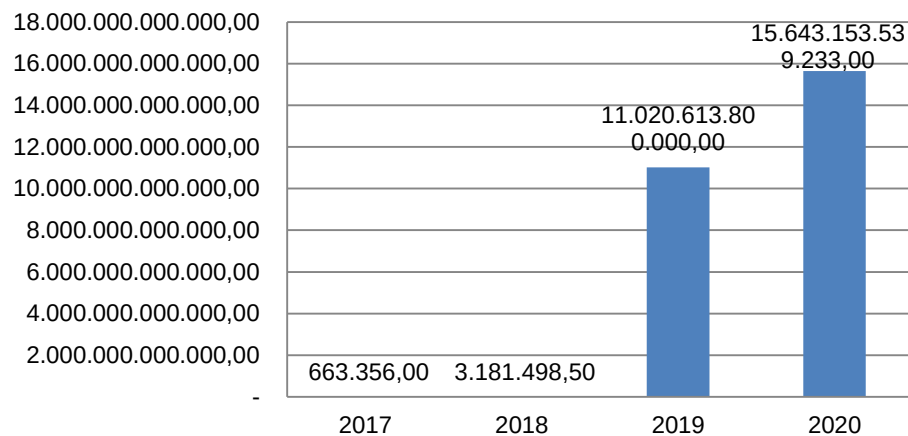
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Investasi	%	18,17	105,9	582,83

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam

Pada tahun 2020, terlepas dari adanya situasi darurat Pandemi Covid-19, investasi di Kota Batam tetap berjalan dan meningkat dimana nilai realisasi investasi dari 105,9% adalah sebesar Rp. 15.643.153.539.233,- yang terdiri dari Rp. 10.041.130.539.233,- nilai investasi PMDN dan Rp. 5.602.023.000.000,- nilai investasi PMA. Peningkatan nilai investasi ini didorong oleh mutu layanan prima yang diberikan kepada pelaku usaha baik pembinaan, konsultasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LPKM. Nilai realisasi ini disumbangkan oleh 3.387 perusahaan yang ada di Kota Batam. Pertumbuhan nilai investasi Kota Batam dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 21

Pertumbuhan nilai investasi Kota Batam dari tahun 2017-2020



Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap target RPJMD telah mencapai 98,12% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 51

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Pertumbuhan Investasi	%	17,7	18,03	105,9	18,73

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP mencapai sasaran ini melalui Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 49.245.000,00 dari anggaran sebesar Rp 5.224.761.000,00 atau 0,94%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 582,83%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, namun hal ini

dikarenakan adanya kendala pembayaran operasional Mall Pelayanan Publik kepada pihak pengelola. Perlu juga diperhatikan dengan tingginya tingkat pertumbuhan investasi ini dipandang sangat perlu bagi Perangkat Daerah terkait untuk bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah melakukan revisi atau peningkatan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD.

19. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATKAN SEKTOR PERTANIAN/PERIKANAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Sektor Pertanian/Perikanan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 98,03% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 19 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 52
Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	%	94,05	92,20	98,03

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi Skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100. (Permentan 65



Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan). Skor PPH merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Batam melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No. 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Penyelenggaraan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kab/Kota mencakup 4 urusan dan 9 sub urusan antara lain pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Tercapainya penganeekaragaman konsumsi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Terkait dengan itu, perkembangan konsumsi pangan penduduk telah menjadi salah satu indikator kinerja unit kerja ketahanan pangan pada jenis pelayanan penganeekaragaman dan keamanan pangan pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan tercapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, yang ditunjukkan dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan sebesar 90% dari target skor PPH tahun 2015. Mengacu pada UU No. 16/1997 tentang Statistik dan PP No. 51/1999 tentang Kegiatan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang berwenang dan bertugas melakukan pengelolaan data statistik di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka menyediakan data terkait pendidikan, kesehatan, konsumsi/pengeluaran rumah tangga serta sosial ekonomi lainnya yang diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, antara lain melaksanakan Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS).

Data rata-rata konsumsi pangan dan gizi penduduk hasil SUSENAS secara khusus BPS dipublikasinya untuk level nasional & provinsi dengan 3 klasifikasi wilayah, yaitu: perkotaan, perdesaan, & gabungan. Pada masing-masing tabel, disajikan pula menurut golongan pengeluaran. Terkait dengan analisis situasi konsumsi pangan penduduk berdasarkan data SUSENAS, secara metodologis terdapat dua hal yang dapat kecenderungan yang dapat mempengaruhi hasil analisis, yaitu:

- Metode "recall" seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi data konsumsi pangan yang diingat oleh responden;

- Ketersediaan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi di luar rumah yang terdapat dalam kuesioner Susenas.

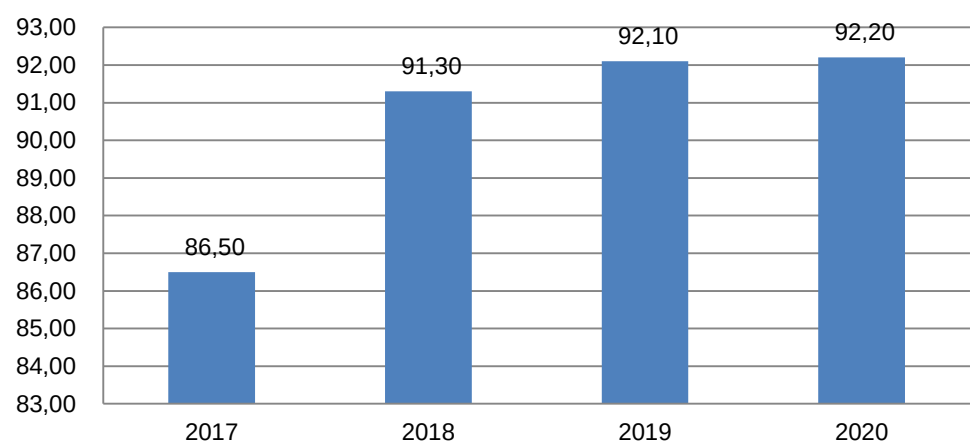
Dengan demikian, kondisi tersebut dapat menyebabkan penilaian kualitas konsumsi pangan menjadi kurang menggambarkan kondisi konsumsi pangan penduduk yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan justifikasi agar data konsumsi pangan penduduk berdasarkan data Susenas lebih mendekati kondisi riil. Indikator ini merupakan Tanggung jawab OPD Dinas Ketahanan Pangan dan indikator capaian kinerja OPD pada Bidang Ketahanan Pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan kepada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun relatif dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan pencapaian skor PPH 100. Capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi tahun 2020 yaitu 92.20 atau 98.03% dari target yang ditetapkan yaitu 94.05.

Berdasarkan Hasil Analisis Pola Pangan Harapan pada Tahun 2020, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Batam yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Batam mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 (Menggunakan data Susenas 2017) sebesar 86.5, tahun 2018 (Menggunakan data Susenas 2018) sebesar 91.3 dan sasaran tahun 2019 (Menggunakan data Susenas 2018) sebesar 92.1 dan tahun 2020 (Menggunakan data Susenas 2019) sebesar 92.2. Konsumsi Protein Per hari masyarakat Kota Batam tahun 2019 sebesar 69.27

Gram/Kapita dan pada tahun 2019 sebesar 74.74Gram/Kapita. Secara agregat konsumsi protein masyarakat Kota Batam telah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012 sebesar 57 gram/kapita/hari. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan konsumsi energi dari tahun 2017 sebesar 2.125,1 kkal/kapita/hari menjadi 2.398,5 kkal/kapita/hari tahun 2018, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2.376,1 kkal/kap/hari sedangkan tahun 2020 Mengalami Kenakan sebesar 2.433 kkal/kap/hari atau 113,1% AKE. Konsumsi energi ini diatas Angka Kecukupan Energi (AKE) yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012 sebesar 2.150 kkal/kapita/hari.

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk pada tahun 2020 di tingkat rumah tangga (menurut SUSENAS tahun 2019) dengan aplikasi baru yaitu Harmonisasi Analisis PPH Berdasarkan Data Susenas yang digunakan untuk AKE 2150 Kkal/Kap/hari. Kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 22
Nilai skor PPH Kota Batam tahun 2017 – 2020



Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap target RPJMD telah mencapai 97,98% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 53

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Meningkatnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	%	91,30	92,10	92,20	94,10

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Capaian sasaran ini melalui Program Peningkatan Ketahanan pangan dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 201.429.900,00 dari anggaran sebesar Rp 207.347.250,00 atau 97,15%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,03%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

20. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA PERAN INDUSTRI KECIL MENENGAH, KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PEREKONOMIAN DAERAH”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Industri Kecil Menengah, Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Perekonomian Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 335,71% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 20 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 54
Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro	%	14	47	335,71

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Pada tahun 2020, Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Kota Batam sampai dengan Desember 2020 terus berkembang secara aktif dan berperan dalam pembangunan Kota Batam dengan sangat baik dan produktif. Adapun pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro selama tahun 2020 per Kecamatan di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 55
Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Batu Ampar	84
2.	Belakang Padang	110
3.	Bulang	39
4.	Galang	12
5.	Lubuk Baja	56
6.	Nongsa	95
7.	Sei. Beduk	100
8.	Sekupang	23
9.	Bengkong	22

10.	Batam Kota	5
11.	Batu Aji	1
12.	Sagulung	8
Total		555

Sementara itu data binaan pelaku usaha (yang terregistrasi) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 56

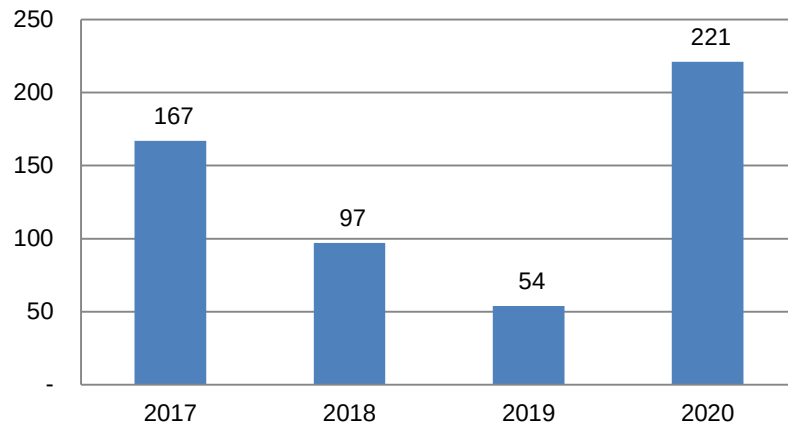
Data Binaan Pelaku Usaha Mikro per Kecamatan Tahun 2017 - 2020

No.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1.	Batu Ampar	-	4	-	8
2.	Belakang Padang	2	1	1	1
3.	Bulang	6	1	1	-
4.	Galang	6	1	1	-
5.	Lubuk Baja	12	3	3	5
6.	Nongsa	3	1	7	11
7.	Sei. Beduk	-	-	-	2
8.	Sekupang	28	13	10	33
9.	Bengkong	16	6	7	27
10.	Batam Kota	24	12	9	64
11.	Batu Aji	41	20	2	39
12.	Sagulung	29	35	13	31
Total		167	97	54	221

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan jumlah data binaan pelaku usaha mikro Kota Batam Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik. 23

Data Binaan Pelaku Usaha Mikro Kota Batam
tahun 2017 - 2020



Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap target RPJMD telah mencapai 313,33% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 57

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro	%	13	13	47	15

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Tingginya capaian Sasaran Meningkatnya Peran Industri Kecil Menengah, Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Perekonomian Daerah dicapai melalui program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat dengan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp 901.924.479,00 dari anggaran sebesar Rp 1.077.487.930,00 atau 83,71%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 335,71%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Namun dengan tingginya tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro ini dipandang sangat perlu bagi Perangkat Daerah terkait untuk bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah melakukan revisi atau peningkatan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD.

21. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR HINTERLAND”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Hinterland” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 62,98% dan termasuk predikat “**Cukup Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 21 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 58
Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland	%	78,02	56,04	71,83
Persentase pemenuhan jembatan/pelantar di Wilayah Hinterland	%	82,73	65,64	79,34
Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland	%	6,7	2,53	37,76
Rata – rata Capaian				62,98

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada indikator Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland ini, Pemerintah Kota Batam mewujudkannya dengan kegiatan meningkatkan Panjang Drainase/Saluran Lingkungan, Panjang Jalan Lingkungan dan panjang Jalan Turap/Talud/ Bronjong di Wilayah Hinterland. Tahun 2020, target yang ditetapkan adalah sepanjang 10.795 km, dan terealisasi sebesar 13,40% atau sepanjang 1.490 m. Capaian rendah ini dikarenakan beberapa kegiatan fisik penunjang penanganan kawasan hinterland tidak terlaksana secara optimal karena dipengaruhi kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda tidak hanya di Kota Batam ataupun Indonesia namun hampir seluruh dunia. Hal ini sangat berdampak pada proses pembangunan, ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengamanatkan kepada

Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk lebih mengutamakan penanganan pandemi Covid-19.

Capaian indikator ini dicapai melalui program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan di Hinterland dengan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp 3.454.222.754,50 dari anggaran sebesar Rp 3.760.803.757,00 atau 91,85%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 71,83%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator tersebut. Hal ini akibat adanya beberapa permasalahan antara lain:

- Kesulitan penataan lingkungan permukiman sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman serta jaringan jalan lingkungan hinterland yang kurang karena sulitnya penanganan dan aksesibilitas menuju lokasi.
- Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan sehingga mengakibatkan terganggunya akselerasi untuk membenahi lingkungan khususnya kawasan Hinterland.
- Relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi mendukung program pemerintah.
- Lemahnya database yang berguna untuk perencanaan.
- Arus urbanisasi yang belum terkendali.
- Pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan ekonomi dan anggaran pada Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Persentase pemenuhan jembatan/pelantar di Wilayah Hinterland.

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, tahun 2020 telah melakukan perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan/pelantar yang ada di daerah hinterland sebesar 65,64% dari target 82,73% dengan capaian 79,34%. Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat untuk dilalui karena adanya Pandemi Covid-19, tentu saja hal ini juga sangat berdampak pada proses pembangunan, ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk lebih mengutamakan penanganan pandemi Covid-19.

Namun, Pemerintah Kota Batam tetap semaksimal mungkin melaksanakan pelayanan pada masyarakat khususnya di kawasan hinterland dengan beberapa kegiatan sehingga indikator ini dapat dilaksanakan dengan program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di Hinterland dengan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp 1.580.002.543,00 dari anggaran sebesar Rp 1.585.266.743,00 atau 99,67%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 79,34%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator tersebut.

c. Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland

Pencapaian indikator ini, Pemerintah Kota Batam mewujudkan dengan menyerahkan wewenang kepada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan pembangunan Panjang Drainase/Saluran Lingkungan,

Panjang Turap/Talud/ Bronjong di Wilayah Hinterland. Namun karena dipengaruhi kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda sehingga beberapa kegiatan fisik penunjang penanganan kawasan hinterland tidak terlaksana secara optimal, dalam hal ini pelaksanaan yang bisa diberikan kepada masyarakat juga menjadi terbatas.

Namun, menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Batam tetap berusaha memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat khususnya di kawasan hinterland sehingga indikator ini tetap dapat dilaksanakan dengan meleburkan beberapa kegiatan program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan di Hinterland, yang mana realisasi dana sesuai dengan indikator Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 37,76%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator tersebut.

Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap rata-rata target RPJMD 97,98% maka telah mencapai 42,30% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 59

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland	%	56,04	56,04	56,04	100
Persentase pemenuhan jembatan/ pelantar di Wilayah Hinterland	%	52,50	65,46	65,64	100
Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland	%	7,81	8,48	2,53	93,67
Rata-rata				41,40	97,89

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Dengan program dan kegiatan yang dilakukan pada dua Perangkat Daerah untuk pencapaian satu sasaran ini, realisasi dana yang digunakan sebesar Rp 5.034.225.297,50 dari anggaran sebesar Rp 5.346.707.500,00 atau 94,17%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 62,98% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

22. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DI HINTERLAND”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Konektivitas Transportasi Di Hinterland” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 22 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 60
Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan pelayanan Transportasi Laut di daerah hinterland	%	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Rumus perhitungan untuk indikator ini adalah Jumlah Kapal yang dibangun dibagi Target Kapal yang dibangun selama lima tahun dikali 100%. Jumlah Kapal yang ditargetkan di bangun selama 5 tahun adalah sebanyak 6 unit kapal.

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Batam tidak ada membangun kapal sehingga persentase jumlah pencapaian target terhadap pembangunan kapal ini mencapai 100% yang ditargetkan pada tahun 2020, hal ini mengingat jumlah kapal yang sudah dibangun oleh Dinas Perhubungan Kota Batam adalah sebanyak 11 unit dari 6 unit yang ditargetkan dalam 5 tahun. Namun mengingat perlakuan atau petunjuk

teknis dalam pelaksanaan yang disusun oleh pemerintah pusat bahwa mulai tahun 2017 terhadap kapal yang dibangun Pemerintah Kota harus diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola dengan persyaratan pengelola adalah masyarakat yang berbadan hukum. Oleh karena itu untuk pembangunan kapal mulai tahun 2017 tidak bisa menambah asset Dinas Perhubungan. Sedangkan jumlah transportasi laut yang sampai saat ini dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan untuk melayani masyarakat hinterland adalah sebanyak 1 unit kapal dan 3 unit speedboat dengan kondisi yang sudah agak memprihatinkan.

Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak ada peningkatan ataupun penurunan, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan telah melayani masyarakat secara optimal dengan memanfaatkan 1 unit kapal yang ada dan 3 unit speedboat.

Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap target RPJMD telah mencapai 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 61

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 22 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Cakupan pelayanan Transportasi Laut di daerah hinterland	%	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Adapun program yang mendukung dalam capaian sasaran ini adalah program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas dengan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp 59.873.000,00 dari anggaran sebesar Rp 59.873.000,00 atau 100%. Perbandingan antara realisasi keuangan capaian kinerja indikator sebesar 100%, maka terjadi efisiensi, namun pencapaian ini dipandang sangat perlu bagi Perangkat Daerah terkait untuk bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah melakukan revisi atau peningkatan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD.

23. Analisis Kinerja Sasaran “TERSEDINYA INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DAN SANITASI DI HINTERLAND”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 115% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 23 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 62
Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta	%	37,29	37,29	100
Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland	%	8,4	10,92	130
Rata - rata Capaian				115

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pada indikator Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta, Pengukuran dilaksanakan atas pemasangan Jaringan air bersih (SR/Sambungan Rumah) di Wilayah Hinterland dengan jumlah SR akhir tahun 2020 berjumlah 6.126 SR atau sekitar 24.504 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan SPAM baru di beberapa lokasi dan penambahan jaringan SR serta penyambungan SR Mandiri di Kegiatan BLUD. Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan pelayanan air bersih diantaranya:

1. Pembangunan SPAM Pulau Temoyong Kelurahan Temoyong Kec. Bulang (DAK Afirmasi) (159 SR atau 636 jiwa)
2. Pembangunan SPAM Pulau Air Gara dan Pulau Bertam Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang (DAK Afirmasi) (184 SR atau 736 jiwa)
3. Pembangunan SPAM Tanjung Banun Kec. Galang (98 SR atau 320 jiwa)
4. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Rempang Cate Kel. Rempang Cate Kec. Galang (7 SR atau 28 jiwa)
5. Penyambungan Baru/Pelanggan baru (mandiri/berbayar) melalui UPT Air Bersih (60 SR atau 240 jiwa)

Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d akhir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut:

Tabel. 63
Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d akhir tahun 2020

No.	Nama WTP/Unit Pelayanan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	Lokasi	Keterangan
1.	WTP Belakang Padang			Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
	Kp. Jawa	148	592	Kel. Sekanak Raya	
	Pl. Sekanak	114	456	Kel. Sekanak Raya	
	Kp. Melayu	136	544	Kel. Sekanak Raya	
	Kp. Bugis Pasir Putih	61	244	Kel. Sekanak Raya	
	Rawasari	91	364	Kel. Tanjung Sari	
	Angkatan Laut	16	64	Kel. Tanjung Sari	
	Kp. Tanjung	157	628	Kel. Tanjung Sari	
	Kp. Baru	142	568	Kel. Tanjung Sari	
	Kp. Tengah	67	268	Kel. Tanjung Sari	
	Pasar	50	200	Kel. Tanjung Sari	
	Dapur Arang	62	248	Kel. Tanjung Sari	
	Kp. Tempang	61	244	Kel. Tanjung Sari	
	Amad Belanda	53	212	Kel. Tanjung Sari	
	Total	1.158	9.264		



2.	SWRO Belakang Padang			Kec. Belakang Padang	Air Laut
	Kp. Jawa	267	1.068	Kel. Sekanak Raya	
	Pl. Sekanak	51	204	Kel. Sekanak Raya	
	Kp. Melayu	9	36	Kel. Sekanak Raya	
	Rawasari	10	40	Kel. Tanjung Sari	
	Kp. Tanjung	178	712	Kel. Tanjung Sari	
	Kp. Baru	13	52	Kel. Tanjung Sari	
	Kp. Tengah	3	12	Kel. Tanjung Sari	
	Lang-Lang Laut	30	120	Kel. Tanjung Sari	
	Pasar	69	276	Kel. Tanjung Sari	
	Kp. Bugis Batu Gajah	138	552	Kel. Tanjung Sari	
	Total	768	3.072		
3.	WTP Bulang Lintang			Kec. Bulang	Tampungan Air Baku (embung)
	Bulang Lintang	119	476	Kel. Bulang Lintang	
	Bulang Kebam	98	392	Kel. Bulang Lintang	
	Total	217	868		



4.	WTP Unit Pemping			Kec. Belakang Padang	
	Pulau Labun	36	144	Kel. Pulau Pemping	
	Pulau Pemping	75	300	Kel. Pulau Pemping	
	Pulau Mongkol	89	356	Kel. Pulau Pemping	
	Total	200	800		
5.	WTP Unit Sembulang	80	320	Kec. Bulang Kel. Sembulang	Tampungan Air Baku (embung)
6.	WTP Unit Pulau Abang			Kec. Galang	Tampungan Air Baku (embung)
	Pulau Abang	208	832	Kel. Pulau Abang	
	Air Saga	71	284	Kel. Pulau Abang	
	Total	279	1.116		
7.	WTP Unit Pulau Mecan			Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
	Pulau Mecan	59	236	Kel. Sekanak Raya	
	Pulau Sarang	77	308	Kel. Sekanak Raya	
	Pulau Lengkang	154	616	Kel. Sekanak Raya	
	Total	293	1.160		
8.	WTP Unit Pulau Air Raja	157	628	Kel. Air Raja Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
9.	WTP Unit Pulau Terong	268	1.072	Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang	Mata Air (Brouncapteri ng)



10.	WTP Unit Pulau Setokok	109	436	Kel. Setokok Kec. Bulang	Tampungan Air Baku (embung)
11.	WTP Unit Pulau Kasu	218	872	Kel. Pulau Kasu Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
12.	IKK Unit Pulau Lance	31	124	Kel. Tembesi Kec. Sagulung	Sambungan dari PT. ATB
13.	WTP Unit Pulau Pecong	242	968	Kel. Pulau Pecong Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
14.	IKK Unit Pulau Buluh	545	2.180	Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang	Sambungan dari PT. ATB
15.	WTP Unit Subang Mas	69	276	Kel. Subang Mas Kec. Galang	Tampungan Air Baku (embung)
16.	IKK Pulau Tiangwangkan	61	244	Kel. Tembesi Kec. Sagulung	Sambungan dari PT. ATB
17.	IKK Pulau Panjang	125	500	Kel. Setokok Kec. Bulang	Sambungan dari PT. ATB
18.	IKK Pulau Akar	104	416	Kel. Setokok Kec. Bulang	Sambungan dari PT. ATB
19.	IKK Tanjung Gundap	111	444	Kel. Tembesi Kec. Sagulung	Sambungan dari PT. ATB
20.	WTP Unit Pulau Geranting	195	780	Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
21.	WTP Unit Rempang Cate	138	552	Kel. Rempang Cate Kec. Galang	Tampungan Air Baku (embung)

22.	WTP Unit Pulau Ngenang	105	420	Kel. Ngenang Kec. Nongsa	Tampungan Air Baku (embung)
23.	WTP Pulau Jaloh	232	928	Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang	Tampungan Air Baku (embung)
24.	WTP Pulau Temoyong	159	636	Kel. Temoyong	Tampungan Air Baku (embung)
25.	WTP Air Gara/Pulau Bertam	184	736	Kel. Kasu	Tampungan Air Baku (embung)
26.	WTP Tanjung Benun	98	320	Galang	Tampungan Air Baku (embung)
J U M L A H		6.126	24.504		

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

- b. Selain melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur penyediaan air bersih di Hinterland, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam juga melaksanakan kegiatan infrastruktur untuk menunjang penyediaan sanitasi yang layak. Indikator Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland diukur dengan penyediaan system penanganan limbah secara komunal atas pemasangan jaringan sanitasi (SR/Sambungan Rumah)di wilayah Hinterland dan kelurahan di mainland yang merupakan lokasi pesisir pantai dengan jumlah SR akhir tahun 2020 berjumlah 1.580 atau sekitar 7.900 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan baru Tangki Septitank Skala Komunal di beberapa lokasi. Daftar pekerjaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan sanitasi diantaranya:

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang (DAK Reguler) (40 SR atau 200 jiwa).
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang (DAK Reguler) (40 SR atau 200 jiwa).
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang (DAK Reguler) (20 SR atau 100 jiwa).
4. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang (DAK Afirmasi) (30 SR atau 150 jiwa).
5. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang (DAK Afirmasi) (40 SR atau 200 jiwa).
6. Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan Pulau Akar Kel. Setokok Kec. Bulang (1 lokasi).
7. Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan Kel. Pemping Kec. Belakang Padang (1 lokasi).

Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d akhir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut:

Tabel . 64

Rekapitulasi SR Sanitasi Kota Batam s.d akhir tahun 2020

No.	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Ket
1.	P. Bulang Lintang	Bulang Lintang/ Bulang	MCK+	25	125	KSM P.BULANG LINTANG	Pembangunan di Tahun 2011
2.	P. Jaloh	Pantai Gelam/ Bulang	MCK+	25	125	KSM P.JALOH	Pembangunan di Tahun 2011
3.	P. Mecan	Sekanak Raya Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P. MECAN	Pembangunan di Tahun 2011
4.	P. Geranting	Pulau Terong/B elakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.GERANTING	Pembangunan di Tahun 2011
5.	Kampung Bukit	Tanjung Riau/Sek upang	IPAL Komunal	29	145	KSM KAMPUNG BUKIT	Pembangunan di Tahun 2012
6.	Tanjung Sengkuang	Tanjung Sengkuang/Batu Ampar	IPAL Komunal	23	115	KSM TANJUNG SENGKUANG	Pembangunan di Tahun 2012
7.	Bulang Kebam	Bulang	MCK+	25	125	KSM BULANG KEBAM	Pembangunan di Tahun 2012
8.	Tanjung Riau	Tanjung Riau/Sek upang	MCK+	25	125	KSM PULAU SERAYA	Pembangunan di Tahun 2012
9.	Air Raja	Air Raja/Galang	IPAL Komunal	38	190	KSM AIR RAJA	Pembangunan di Tahun 2015
10.	P. Abang	Pulau Abang/Galang	IPAL Komunal	132	660	KSM PULAU ABANG	Pembangunan di Tahun 2015



11.	P. Pemping	Pemping/ Belakang Padang	IPAL Komunal	38	190	KSM LANCANG KUNING	Pembangu nan di Tahun 2016
12.	Sagulung	Tembesi/ Sagulung	IPAL Komunal	57	285	KSM TIANGWA NGKANG SUKSES	Pembangu nan di Tahun 2016
13.	Setokok	Setokok/B ulang	IPAL Komunal	70	350	CV. ADELIA PRATAMA	Pembangu nan di Tahun 2016
14.	Pecung	Pecung/B elakang Padang	IPAL Komunal	41	205	KSM PECUNG MANDIRI	Pembangu nan di Tahun 2017
15.	Kabil	Kabil/Non gsa	IPAL Komunal	44	220	KSM PUNGGUR SEHAT SEJAHTER A	Pembangu nan di Tahun 2017
16.	Subang Mas	Subang Mas/Gala ng	IPAL Komunal	41	205	KSM SUBANG MAS CEMERLA NG	Pembangu nan di Tahun 2017
17.	Sekanak	Sekanak/ Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	75	375	KSM MELAYU BERSATU	Pembangu nan di Tahun 2018
18.	Pulau Lengkang	Sekanak/ Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM LENGKAN G BERSATU	Pembangu nan di Tahun 2018
19.	Pulau Mecan	Sekanak/ Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	48	240	KSM MECAN JAYA	Pembangu nan di Tahun 2018
20.	Pulau Sarang	Sekanak/ Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM SARANG BERSATU	Pembangu nan di Tahun 2018



21.	Pulau Kasu	Kasu/Bela kang Padang	Komunal Kombinasi	225	1,125	KSM KASU JAYA	Pembangunan di Tahun 2018
22.	Pulau Ngenang	Ngenang/Nongsa	IPAL Komunal	75	375	KSM NGENANG JAYA	Pembangunan di Tahun 2018
23.	Pulau Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	IPAL Komunal	105	525	HINTERLAND BERBAKTI	Pembangunan di Tahun 2019
24.	Pulau Karas	Karas/Galang	IPAL Komunal	84	420	KSM GALANG GEMILANG	Pembangunan di Tahun 2019
25.	Pulau Lance	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	35	175	LANCE GEMILANG PERMAI	Pembangunan di Tahun 2019
26	Tanjung Riau Kecamatan	Tanjung Riau/Sekupang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM TANJUNG RIAU ELOK	Pembangunan di Tahun 2020
27	Rempang Cate	Rempang Cate/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM CATE BERSIH	Pembangunan di Tahun 2020
28	Sembulang	Sembulang/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	20	100	KSM SEMBULANG JAYA	Pembangunan di Tahun 2020
29	Bulang Lintang Kecamatan	Bulang Lintang/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	30	150	KSM BULANG LESTARI	Pembangunan di Tahun 2020
30	Pantai Gelam Kecamatan	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM MAJU BERSAMA	Pembangunan di Tahun 2020
				1.580	7.900		

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen dari semua Stage Holder untuk percepatan penuntasan infrastruktur layanan air bersih untuk semua wilayah Hinterland dan kawasan yang menjadi tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Pada Tahun 2020 dirancang peningkatan penanganan sumber-sumber air di wilayah Hinterland yang memiliki sumber air baku dan atau yang memiliki konektivitas jaringan pipa ATB terdekat. Selain itu keterlibatan masyarakat berupa hibah lahan ikut punya andil yang besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secepatnya dapat tercapai.
- 2) Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman di wilayah Hinterland juga mendapat dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat setempat.
- 3) Pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih sampai pada meteran didepan rumah.
- 4) Yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari Pemerintah Pusat melalui penyediaan dana DAK baik untuk penyediaan sarana air bersih maupun sanitasi komunal.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor-faktor yang menjadi kendala pencapaian sasaran, antara lain:

- 1) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana sanitasi yang mengalami kerusakan kurang optimal, sehingga pemeliharaan menunggu dana dari Pemerintah.

- 2) Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam sangat tinggi, sehingga berakibat sulitnya membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan.
- 3) Sulitnya dan terbatasnya sumber air baku yang tersedia kurang memadai untuk dilakukan pengolahan air bersih sampai mengalir ke rumah-rumah, bahkan ada sebagian lokasi WTP hanya mengandalkan sumber air hujan.
- 4) Lokasi yang akan dijadikan pengolahan air bersih merupakan pulau-pulau kecil hanya berpenduduk tidak kurang dari 100 jiwa, sehingga menimbulkan *cost* yang tidak sedikit.

Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap rata-rata target RPJMD 52,79% maka telah mencapai 91,32% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 65

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 23 terhadap target RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta	%	33,18	35,16	37,29	39,55
Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland	%	4,74	9,18	10,92	13,24
Rata-rata				48,21	52,79

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Sasaran ini dicapai melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi dengan realisasi dana yang digunakan adalah sebesar Rp 43.207.259.924,67 dari anggaran sebesar Rp 43.665.448.556,20 atau 98,95%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 115% dan realisasi keuangan sebesar 98,95% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

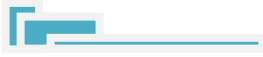
Tabel 66

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Ket
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan berkualitas	100	48,49	Efisien
2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	88,86	95,77	Tidak Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	94,75	Efisien
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	-4,81	88,69	Tidak Efisien
5	Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan	98,53	93,66	Efisien
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	97,12	96,29	Efisien



7	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	100,73	83,38	Efisien
8	Meningkatkan kualitas peran gender	99,43	74,24	Efisien
9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	96,84	42,41	Efisien
10	Mengurangi angka pengangguran	51,74	98,84	Tidak Efisien
11	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	100	87,45	Efisien
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	104,98	91,18	Efisien
13	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	100	83,51	Efisien
14	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman	69,48	94,27	Tidak Efisien
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	104,54	79,52	Efisien



16	Meningkatkan kinerja sector Perindustrian dan perdagangan	80,51	69,15	Efisien
17	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	100	82,77	Efisien
18	Peningkatan Investasi Kota Batam	582,83	0,94	Efisien (dengan catatan)
19	Meningkatkan sektor pertanian/perikanan	98,03	97,15	Efisien
20	Meningkatnya peran industri kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	335,71	83,71	Efisien
21	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland	62,98	94,71	Tidak Efisien
22	Meningkatnya konektivitas Transportasi di hinterland	100	100	Efisien
23	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	115	98,95	Efisien

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

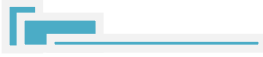
1. Pemerintah Batam dalam melaksanakan amanahnya berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020.
2. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Batam atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Batam Tahun 2020 yang terdiri dari 23 sasaran, adalah sebagai berikut:
 - a) Capaian kinerja $\geq 90\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 17 sasaran, atau 73,91%;
 - b) Capaian kinerja 70 s/d $<90\%$ kategori “berhasil” sebanyak 2 sasaran, atau 8,70%;
 - c) Capaian kinerja 50 s/d $<70\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 13,04%; dan
 - d) Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 4,35%.

Rata-rata capaian 23 sasaran mencapai 120,98%, rata-rata realisasi anggaran dalam mencapai target sasaran sebesar 81,73%. Prestasi Pemerintah Kota Batam selama tahun 2020 sebanyak 12 prestasi.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan kedepan dalam menjawab tantangan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki kualitas Perencanaan Kinerja serta menjadikan target kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
2. Memperbaiki kualitas Pengukuran Kinerja terkait IKU organisasi serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja dari tingkat Eselon II sampai Eselon IV.
3. Menyamakan persepsi dan membuat kesepakatan antar semua pejabat di unit kerja masing - masing tentang identifikasi IKU dan dokumen apa serta kegiatan apa yang dijadikan bukti dukung capaian IKU tersebut.
4. Informasi capaian kinerja harus secara jelas dijabarkan dalam dokumen Laporan Kinerja sehingga dapat memberikan keyakinan bagi pembaca bahwa capaian kinerja yang disampaikan dapat diandalkan.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Perangkat Daerah dengan berbagai unsur dalam pembangunan untuk mewujudkan kinerja yang semakin berkualitas.
6. Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengupayakan inovasi-inovasi pelayanan publik.



LAMPIRAN



DAFTAR PRESTASI PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020

No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
1	2020	Menteri Perhubungan Republik Indonesia	ADIKARYA DIRGANTARA ADHIRAJASA Penghargaan sebagai Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah pada Misi Kemanusiaan dalam Rangkaian Penjemputan Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, Provinsi Hubei, China ke Indonesia pada Tanggal 1 s.d. 2 Februari 2020





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
2	2020	Seven Media Asia dan MICH International	WALIKOTA BATAM KATEGORI BEST MAYOR 2020 Piagam Penghargaan Pemimpin Pembawa Perubahan untuk Indonesia





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
3	2020	Badan Pusat Statistik Republik Indonesia	Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kota Batam atas Prestasi sebagai Kota dengan Capaian Response Rate yang Melebihi Target dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Online.





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
4	2020	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	Piagam Penghargaan Lomba Inovasi Daerah Tataan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 sebagai Daerah Favorit





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
5	2020	KADIN Kota Batam	Penghargaan sebagai Walikota Pembangunan Kota Batam





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
6	2020	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	Piagam Penghargaan JDIH Kabupaten/ Kota Kedua Se-Kepri Terintegrasi 100% dengan JDIHN kepada Kota Batam





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
7	2020	Persatuan Muballigh Kota Batam	Piagam Penghargaan kepada H. Muhammad Rudi, SE., MM sebagai Tokoh Penggerak Dakwah Kota Batam





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
8	2020	Citiasia, Inc.	INDONESIA SMARTNATION AWARD 2020 PENGHARGAAN atas Inovasi Smart Economy Aplikasi Bakula (Belanja Online Sayuran, Buah, dan Bumbu Dapur) kepada Kota Batam





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
9	2020	Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia	Piagam penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Terbaik I tahun 2020 Kategori Kota





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
10	2020	Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia	Penghargaan Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Tahun 2019 kepada Pemerintah Kota Batam





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
11	2020	KADIN Kota Batam	Penghargaan Kepada Muhammad Rudi atas Upaya dan Usaha dalam Penanganan Pandemic Covid-19 dengan tetap Menjaga Kegiatan Usaha dan Ekonomi Kota Batam





No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
12	2020	Perkumpulan Rumah Seni Asnur	Piagam Penghargaan kepada Muhammad Rudi sebagai Pemantun Kehormatan Pantun Mutiara Budaya Indonesia

